

(RENSTRA)

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAMBI

2010 - 2015



PRAMERAN
PRODUKSI

BATIK-INVESTOR
LELANG AGRO

ekspor

modal
pasar

INFORMASI

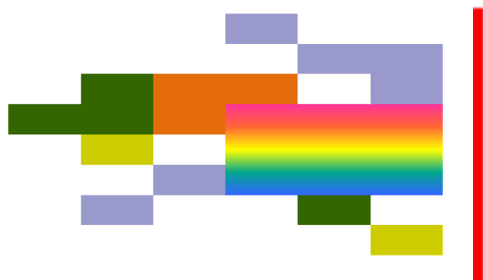
KERAJINAN

INDUSTRI MENENGAH
LELANG KAREWENGAH
INVESTASI

TERA/TERA ULANG

magang

KUB



KATA PENGANTAR

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Menindak lanjuti amanat tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2010-2015 guna mendukung daya saing ekonomi bangsa disektor perindustrian dan perdagangan.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah khususnya di sektor industri dan perdagangan sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Renstra ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2005-2010 serta perubahan paradigma peningkatan daya saing dan kecenderungan pengembangan industri dan perdagangan ke depan.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 yaitu untuk **“Industrialisasi, Perdagangan sebagai Motor Penggerak Ekonomi (Primover) menuju Jambi Emas 2010-2015”**, maka akan dilakukan evaluasi setiap tahunnya.

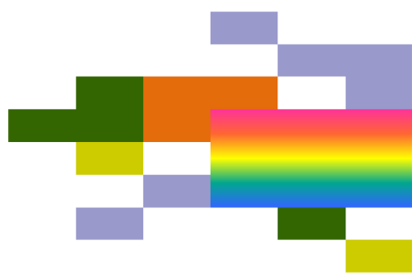
Dikarenakan adanya perubahan pada Misi ke 2 dan adanya pengurangan jenis pelayanan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi, maka Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini mengalami Revisi pada Tahun 2013. Renstra ini diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jambi, 2013

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi

Drs. H. ABD. ZAKI, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 19591112 199003 1 005



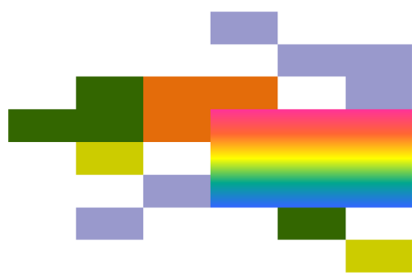


DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar.....	iv
Daftar Tabel	v
Keputusan Gubernur Jambi Nomor 462/Kep.Gub/Bappeda-2/2012.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	10
2.2. Sumber Daya SKPD.....	14
2.3. Kinerja Pelayanan	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	36
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI	40
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan SKPD.....	40
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	43
3.3. Telaahan Renstra K/L	48
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	52
4.1. Visi dan Misi.....	52
4.2. Tujuan dan Sasaran.....	53
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	59
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF	70
5.1. Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	70
5.2. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif	87

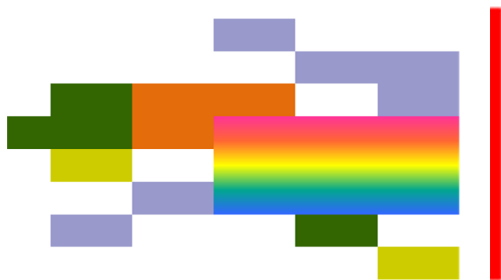
BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	97
BAB VII	PENUTUP.....	111



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1.	Hubungan antara Renstra Disperindag Provinsi Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi.....	3
Gambar 1.2.	Gambaran Kerangka Pikir Penyusunan Renstra Disperindag Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.....	9
Gambar 2.1.	Struktur Organisasi Disperindag Provinsi Jambi	14
Gambar 2.2.	Grafik pegawai berdasarkan golongan	15
Gambar 2.3.	Grafik pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal.....	15
Gambar 2.4.	Grafik pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal	16
Gambar 2.5.	Grafik pegawai berdasarkan Usia	17
Gambar 2.6.	Grafik pegawai berdasarkan Masa Kerja	17
Gambar 2.7.	Grafik pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	18
Gambar 2.8.	Grafik pegawai berdasarkan Tingkat Jabatan	19
Gambar 2.9.	Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas Tahun 2008-2010.....	24
Gambar 2.10	Total Volume Ekspor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.....	29
Gambar 2.11	Total Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.....	29
Gambar 2.12	Total Volume Impor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.....	30
Gambar 2.13	Total Nilai Impor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.....	31



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Kerja Disperindag Provinsi Jambi.....	19
Tabel 2.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku Provinsi Jambi Tahun 2008-2010.....	23
Tabel 2.3. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2008-2010	24
Tabel 2.4. Perkembangan Industri Kecil di Provinsi Jambi.....	25
Tabel 2.5. Perkembangan Industri Menengah dan Besar di Provinsi Jambi	26
Tabel 2.6. Perkembangan Usaha Perdagangan di Provinsi Jambi.....	27
Tabel 2.7. Perkembangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Provinsi Jambi	28
Tabel 2.8. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Provinsi Jambi	28
Tabel 2.9. Perkembangan Ekspor Non Migas di Provinsi Jambi.....	29
Tabel 2.10. Perkembangan Impor di Provinsi Jambi	29
Tabel 2.11. Perkembangan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD BPSMB dan Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi	31
Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2006-2010	34
Tabel 2.13. Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi Tahun 2006-2010.....	35
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Disperindag Provinsi Jambi	42
Tabel 3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur	47
Tabel 3.3. Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong	50
Tabel 4.1. Perkiraan Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2010-2015.....	56
Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	59

Tabel 4.3.	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Disperindag Provinsi Jambi	61
Tabel 4.4.	Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Disperindag Provinsi Jambi.....	62
Tabel 5.1.	Lokasi Pelaksanaan dan Indikatif Program Tahun 2010-2015 Disperindag Provinsi Jambi.....	87
Tabel 5.2.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Disperindag Provinsi Jambi	88
Tabel 6.1.	Perkembangan Indikator Makro Bidang Industri dan Perdagangan Tahun 2010-2015	102
Tabel 6.2.	Indikator Kinerja Dinas Perindag Provinsi Jambi yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	103





KATA PENGANTAR

Diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun Kementerian/Lembaga Negara, Lembaga Pemerintah non-departemen diharuskan menyusun RENSTRA dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Renstra SKPD Tahun 2010-2015 dimaksudkan untuk merencanakan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan terwujudnya pencapaian Visi Renstra SKPD, maka akan dilakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah setiap tahunnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

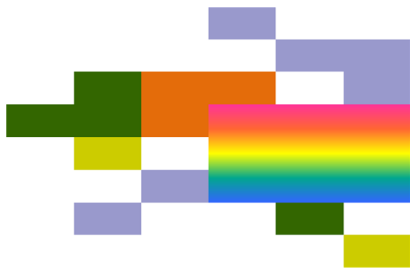
Renstra SKPD diharapkan akan mampu meningkatkan keterpaduan, keteraturan dan keterkendalian perencanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai kinerja yang tinggi sebagaimana yang digariskan pada indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Jambi,

2012

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengatur untuk mewujudkan sistem perencanaan daerah yang handal dan merupakan kunci pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan daerah akan sesuai dengan harapan apabila melalui perencanaan yang tersusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan isu strategis. Hal ini bertujuan untuk mendorong koordinasi antara pelaku pembangunan guna terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sehingga tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, menyatakan bahwa ruang lingkup perencanaan daerah terdiri dari RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, maka Pemerintah Daerah bersama dengan SKPD diwajibkan menyusun dokumen dimaksud diantaranya adalah Renstra SKPD.

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan resmi SKPD yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan publik SKPD dan pembangunan daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. SKPD bertanggungjawab atas kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan ini. Selain itu urgensi penyusunan Renstra SKPD ini adalah :

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD
- b. Dasar penilaian kinerja Kepala SKPD

- c. Menjadi acuan penyusunan LAKIP SKPD
- d. Sebagai bahan evaluasi yang penting agar pembangunan dapat berjalan secara lebih sistematis, komprehensif dan tetap focus pada pemecahan masalah-masalah yang mendasar.

Secara umum Renstra SKPD diharapkan dapat menjawab 2 (dua) hal mendasar yaitu :

- a. Arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai SKPD 5 tahun kedepan.
- b. Langkah-langkah strategi yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai.

Sebagaimana yang dimanatkan dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, maka dalam rangka mendukung daya saing ekonomi Provinsi Jambi khususnya di sektor Industri dan Perdagangan, kedepan perlunya penyusunan perencanaan daerah sektor Industri dan Perdagangan yang dituangkan dalam Dokumen Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015.

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berisikan tentang arah, visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sektor Industri dan Perdagangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 5 tahun kedepan (2010-2015). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan mendasar dan tantangan terkini yang dihadapi dalam pembangunan sektor Industri dan Perdagangan.

Dalam pelaksanaannya, Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan serta dukungan dari pada masyarakat, stake holder yang terkait dengan perindustrian dan perdagangan serta pihak eksekutif dan legislatif baik dalam bentuk fasilitasi kebijakan maupun pendanaan yang sangat erat kaitannya dengan implentasi program dan kegiatan yang menjadi wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Adapun hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan RPJPD Provinsi Jambi

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2010 – 2015 merupakan rencana pembangunan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra selain memuat visi, misi dan program prioritas SKPD juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi. Dalam RPJPD Provinsi Jambi 2005 – 2025, dengan visi **JAMBI YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN SEJAHTERA**, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pembangunan Nasional Tahun

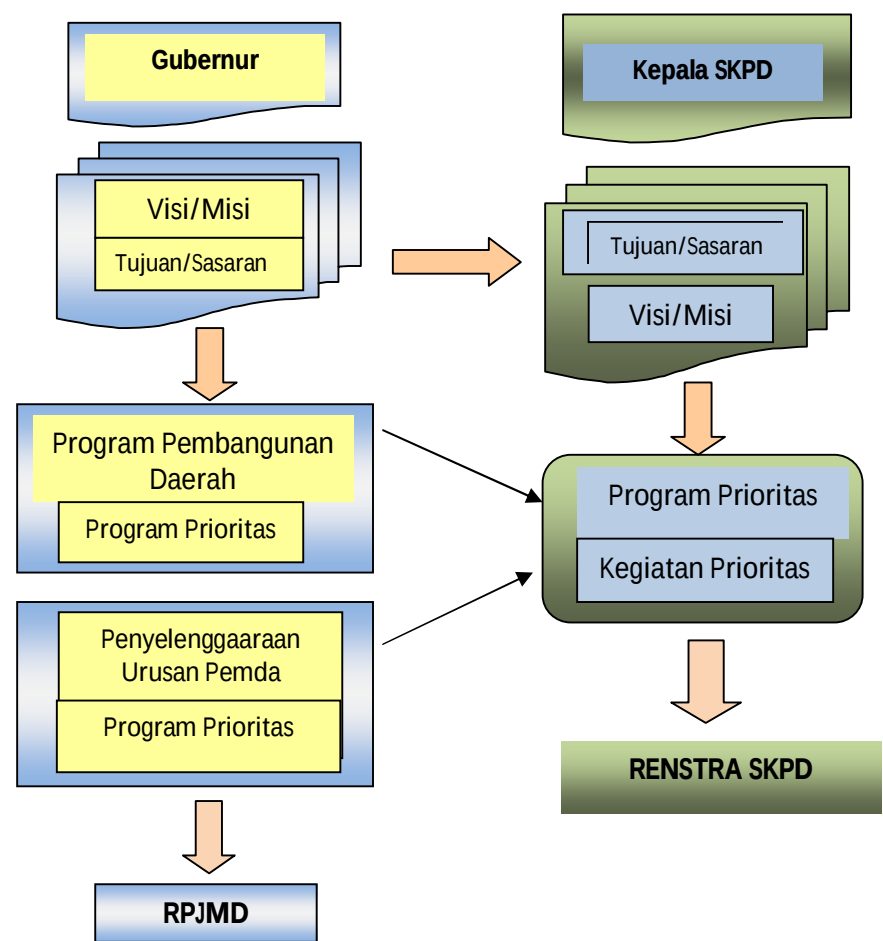


2005-2025 yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang tersebut ditempuh melalui 6 (enam) misi pembangunan yaitu : (1) Mewujudkan daerah yang memiliki keunggulan kompetitif; (2) Mewujudkan Masyarakat beriman, bertaqwa dan Berbudaya; (3) Mewujudkan masyarakat demokratis dan berbudaya hukum; (4) Mewujudkan kondisi yang aman, tentram dan tertib; (5) Mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan; (6) Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pada tahap kedua Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang dimuat di dalam RPJPM Provinsi Jambi, menepatkan fokus pembangunan lebih di arahkan pada peningkatan kualitas pelayanan dasar, pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kualitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Ketiga fokus pembangunan ini ditujukan dalam rangka meningkatkan dan memperkuat identitas pembangunan Provinsi Jambi yang konsisten menuju terwujudnya visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi 2005-2025.

2. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi

Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi 2010 – 2015 merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat Visi, Misi, Arah Kebijakan Teknis dan Indikasi Rencana Program setiap Bidang Kewenangan dan atau Fungsi Pemerintahan untuk jangka waktu lima tahunan dan disusun oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi. Dengan demikian kesinambungan dan konsistensi perencanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1.1. Hubungan antara Renstra Disperindag Provinsi Jambi dengan RPJMD Provinsi Jambi



3. Renstra Dinas Perindag Provinsi Jambi dengan Renja Dinas Perindag Provinsi Jambi

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap unit kerja daerah dan disusun sebagai penurunan Renstra SKPD dan memuat rencana kegiatan pembangunan tahun berikutnya, yang dilengkapi dengan formulir kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta indikasi pembiayaan.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini , peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum (rujukan), antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra

- Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 10. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembagian Urusan Kewenangan Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 43.1/M-IND/PER4/2010 tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perindustrian Tahun 2010;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008, tentang Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 16);
21. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Pada Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jambi.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jambi Tahun 2010-2015 ini disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1. Maksud

- a. Memenuhi amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- b. Memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan bidang perindustrian dan perdagangan dengan melakukan perencanaan terpadu dan menyelaraskan pelaksanaan program serta mengendalikannya untuk kurun waktu 2010-2015, sehingga diharapkan mampu mendukung pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.
- c. Sebagai salah satu media pertanggungjawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2008.

1.3.2. Tujuan

- a. Penyediaan suatu dokumen yang strategik dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi atau masalah di bidang perindustrian dan perdagangan.

- b. Sebagai perencanaan arah kebijakan, pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- c. Menjadikan indikator dan bahan evaluasi untuk perbaikan, peningkatan kinerja pada masa mendatang.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara umum bahwa RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, dan Sistematika Penulisan.

2. BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

Bab ini berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.

3. BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini menjelaskan tentang identifikasi Permasalahan, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Renstra K/L dan Penentuan Isu-isu Strategis.

4. BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang visi, misi organisasi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan.

5. BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan organisasi , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran serta Pendanaan Indikatif dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

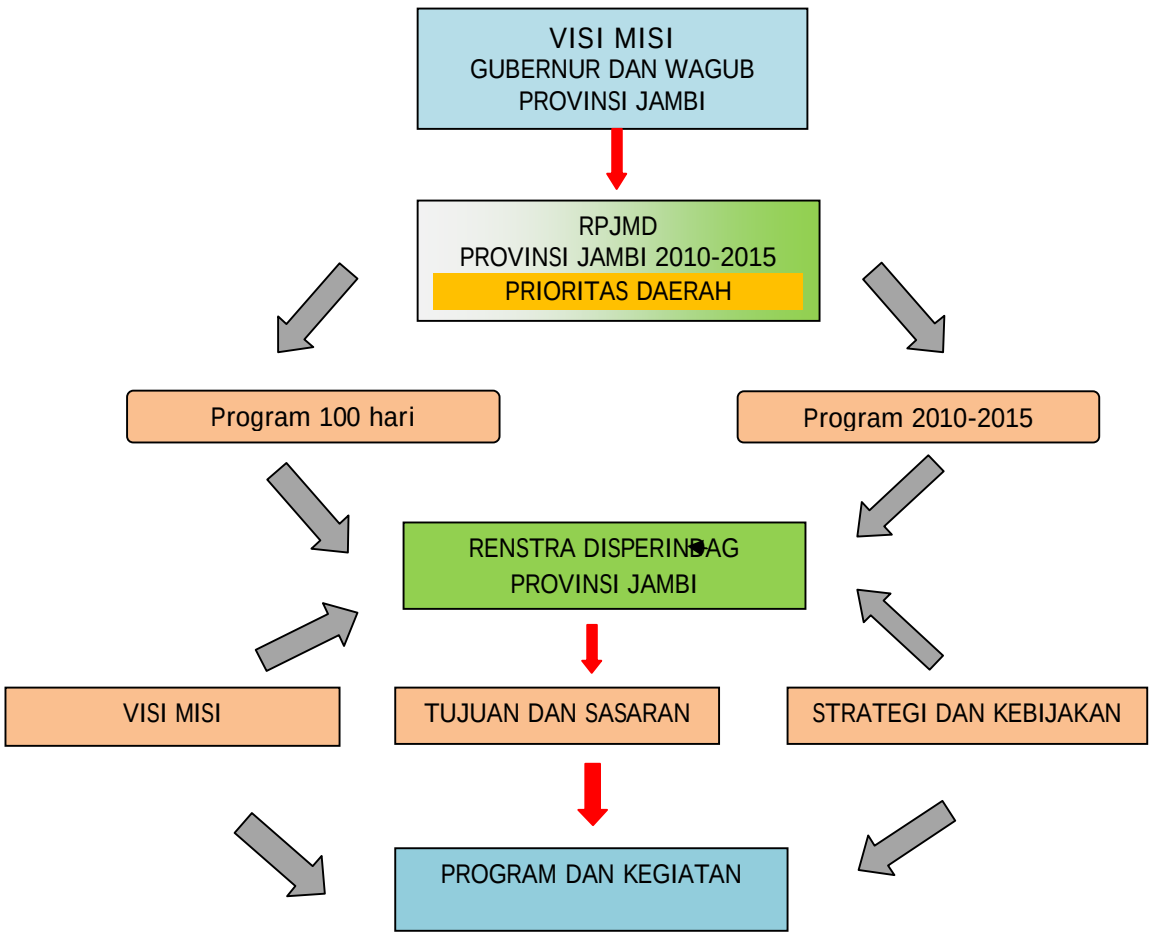
6. BAB VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab ini menguraikan Indikator Kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 tahun mendatang sebagaimana komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

7. BAB VIII. PENUTUP

Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 mengikuti Hierarki Sasaran Daerah yang fokus pada kinerja sebagaimana dalam skema pada gambar 1.2.

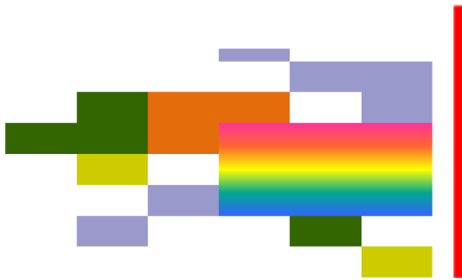
Gambar 1.2. : Gambaran kerangka pikir penyusunan RENSTRA Disperindag Provinsi Jambi Tahun 2010-2015



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 telah menetapkan prioritas daerah yang ingin dicapai pada Tahun 2010-2015 sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih. Prioritas Daerah dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 tersebut dijabarkan dalam Program 100 Hari dan Program yang akan dilaksanakan pada kurun waktu tersebut.

Prioritas Daerah dalam RPJMD Tahun 2010-2015 selanjutnya menjadi acuan dalam penetapan sasaran kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Renstra dimaksud merupakan penjabaran Visi, Misi, Strategi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan yang akan dicapai untuk masa kerja 5 (lima) tahun mendatang.





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai ***tugas melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.***

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai ***fungsi*** yaitu;

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 204 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan
4. Bidang Industri Menengah dan Besar
5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri
6. Bidang Perdagangan Luar Negeri
7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas .

Tugas Kepala Dinas yaitu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 204 serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD dan Kelompok jabatan Fungsional.

2. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian.

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asset
- c. Kepala Sub Bagian Program

Tugas Sekretariat yaitu memberikan pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan umum dan hukum kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan maupun pihak-pihak terkait. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Melaksanakan koordinasi keuangan, kepegawaian, umum dan hukum.
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, pemeliharaan gedung di lingkungan kantor, kendaraan operasional, protokoler dan rumah tangga Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

3. Bidang Industri Kecil dan Kerajinan terdiri dari tiga seksi.

- a. Kepala Seksi Bimbingan Usaha
- b. Kepala Seksi Bimbingan Produksi
- c. Kepala Seksi Promosi dan Dalin

Tugas Bidang Industri Kecil dan Kerajinan yaitu melaksanakan bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana produksi, teknologi pemasaran/permodalan, kemitraan, promosi pemasaran Industri Kecil dan Kerajinan serta memfasilitasi kemudahan Investasi Industri, analisa iklim usaha pengendalian lingkungan dan kerjasama bidang industri. Sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Menyusun juknis, bimbingan pembinaan dan pengendalian industri.
- b. Fasilitasi bantuan teknis teknologi (proses produksi), pemasaran, modal peralatan dan kemitraan.
- c. Fasilitasi promosi Pameran Dalam Negeri dan Luar Negeri, sinergi dengan program instansi terkait.
- d. Fasilitasi kemudahan investasi industri, kemudahan perolehan modal dengan mitra usaha industri/dagang besar.
- e. Melaksanakan bimbingan dan pemantauan penanganan pengendalian lingkungan.
- f. Mensosialisasikan kebijakan teknis dan peraturan Perundangan-undangan Bidang Industri.
- g. Kerjasama dengan bidang lain untuk pengembangan industri.

4. Bidang Industri Menengah dan Besar terdiri dari tiga seksi.
 - a. Seksi Bimbingan Usaha
 - b. Seksi Bimbingan Produksi
 - c. Seksi Promosi dan Pengendalian Lingkungan

Tugas Bidang Industri Menengah dan Besar yaitu melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana, usaha, produksi, analisis iklim usaha lingkungan, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi kebijakan teknis di bidang industri Menengah dan Besar, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan serta pedoman kegiatan usaha dibidang industri menengah dan besar.
- b. Penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi dibidang industri menengah dan besar.
- c. Penyiapan bahan pembinaan dibidang industri menengah dan besar.
- d. Menganalisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha dibidang industri menengah dan besar.
- e. Fasilitasi promosi pameran di Dalam dan Luar Negeri sinergi dengan program instansi terkait.

5. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri dari tiga seksi.
 - a. Seksi Bina Usaha dan Distribusi
 - b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Perlindungan Konsumen
 - c. Seksi Sarana dan Pengembangan Pasar Dalam Negeri

Tugas Bidang Perdagangan Dalam Negeri yaitu melaksanakan bimbingan teknis terhadap kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana usaha perlindungan konsumen, promosi dan pengembangan pasar dalam negeri, untuk kelancaran pengadaan, distribusi dan stabilitas harga bahan pokok/penting strategis serta pengawasan terhadap barang beredar. sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha perdagangan dalam negeri.
- b. Pemberian bimbingan kebijaksanaan pengembangan sarana usaha perdagangan Dalam Negeri.
- c. Penyiapan bahan bimbingan kebijaksanaan pembinaan perdagangan Dalam Negeri.
- d. Menganalisa iklim usaha dan lingkungan guna peningkatan hasil kerja perdagangan Dalam Negeri
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis Perdagangan Dalam Negeri.

6. Bidang Perdagangan Luar Negeri terdiri dari tiga seksi :
 - a. Seksi Ekspor



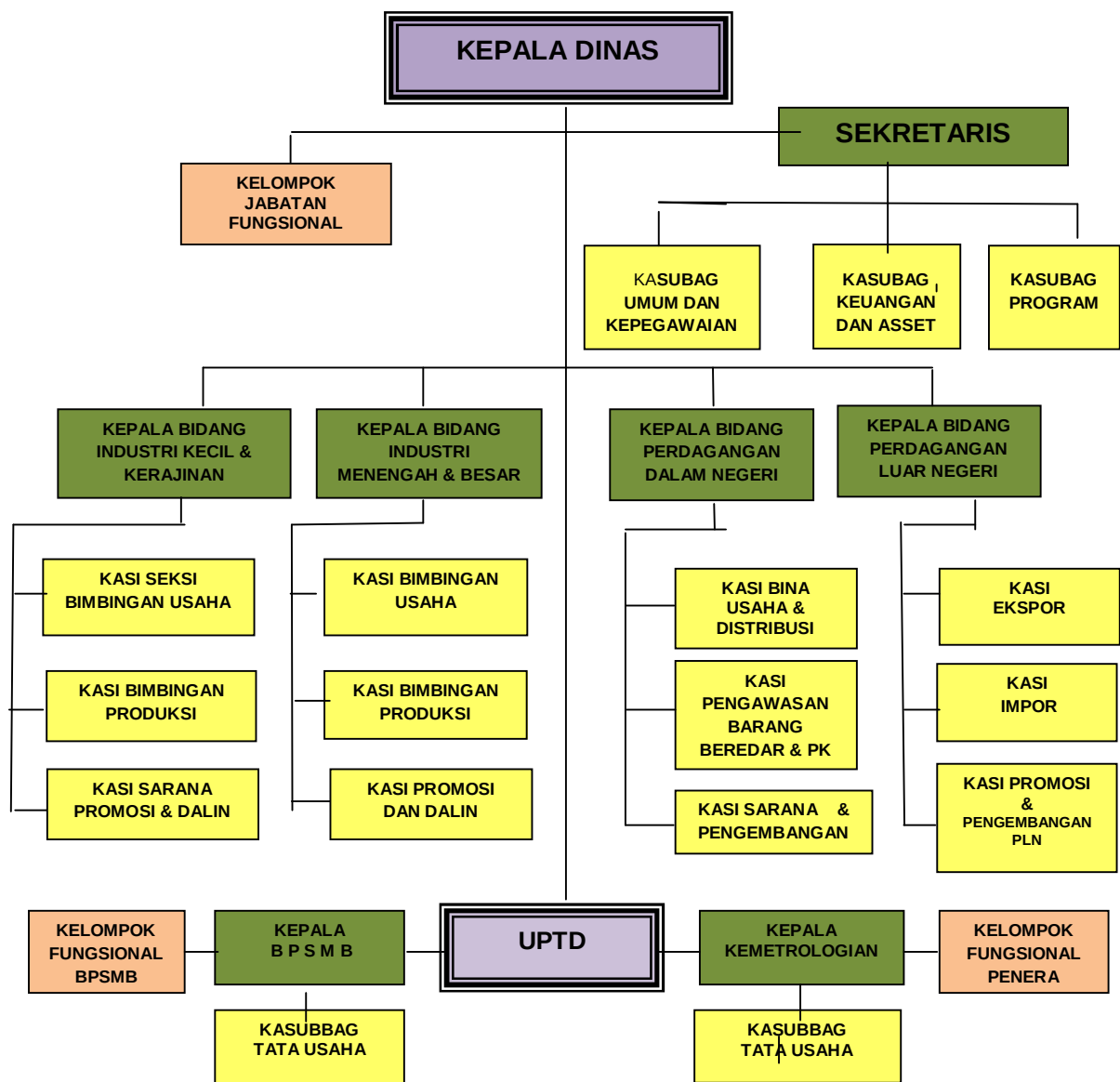
- b. Seksi Import
- c. Seksi Promosi dan Pengembangan Pasar Luar Negeri.

Tugas Bidang Perdagangan Luar Negeri yaitu melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan ekspor, import, kerjasama Luar Negeri dan Iklim, Usaha serta evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang Perdagangan Luar Negeri dan memberikan bahan masukan kepada pusat sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan Ekpor Import, sedangkan fungsinya antara lain :

- a. Menyusun juknis pembinaan dan pedoman kegiatan usaha Perdagangan Luar Negeri
 - b. Melaksanakan fasilitasi kemudahan penerapan kebijakan peraturan ekspor dan import.
 - c. Melakukan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha
 - d. Melakukan dorongan peningkatan kerjasama ekspor komoditi Indag.
 - e. Melakukan promosi dagang ke pasar Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
 - f. Menyediakan data ekspor dan import yang cepat dan akurat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) terdiri dari dua yaitu :
- a. UPTD Kemetrolgian
 - b. UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB)
- Melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah Kab/Kota.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
- a. Fungsional Industri Kecil dan Kerajinan
 - b. Fungsional Kemetrolgian
 - c. Fungsional Mutu Barang
9. Staf pelaksana berjumlah sebanyak 119 orang.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 30 Tahun 2008 tersebut diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Jambi mempunyai struktur organisasi sebagaimana gambar 2.1 yaitu :

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Disperindag Provinsi Jambi



2.2. Sumber Daya SKPD

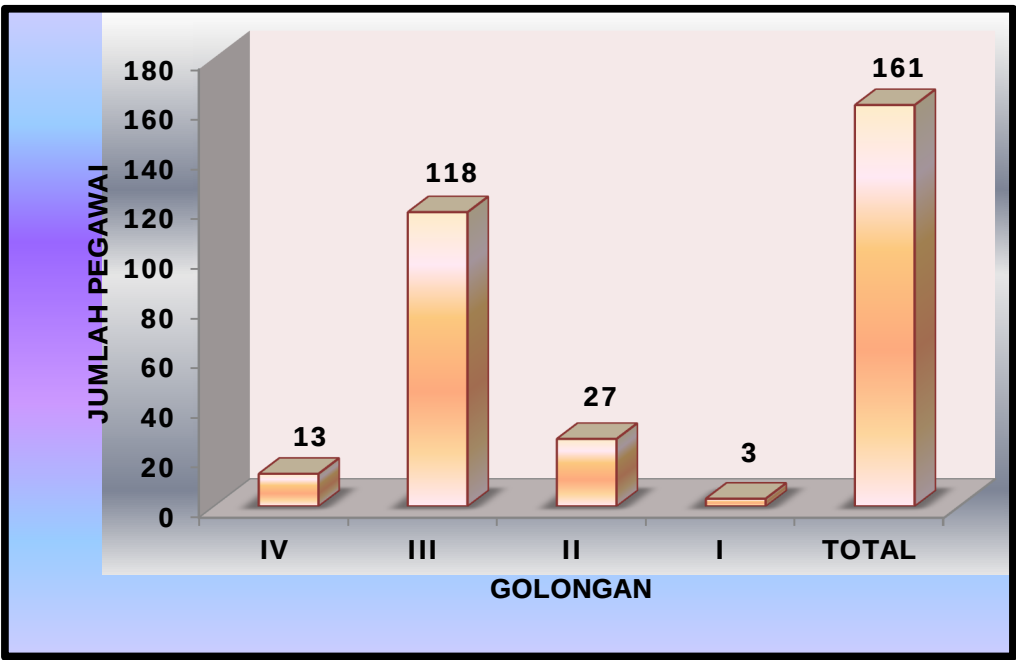
2.2.1. Sumber Daya Aparatur/Pegawai

Untuk mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, saat ini Disperindag Provinsi Jambi memiliki Pegawai sampai dengan 31 Desember 2010 sebanyak 161 orang terdiri dari :

- a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan = 114 orang
- b) UPTD Balai Pengujian Mutu Barang = 24 orang
- c) UPTD Balai Pelayanan Metrologi = 23 orang

Komposisi tenaga personil tersebut diatas, ditinjau dari berbagai aspek menggambarkan sebagai berikut :

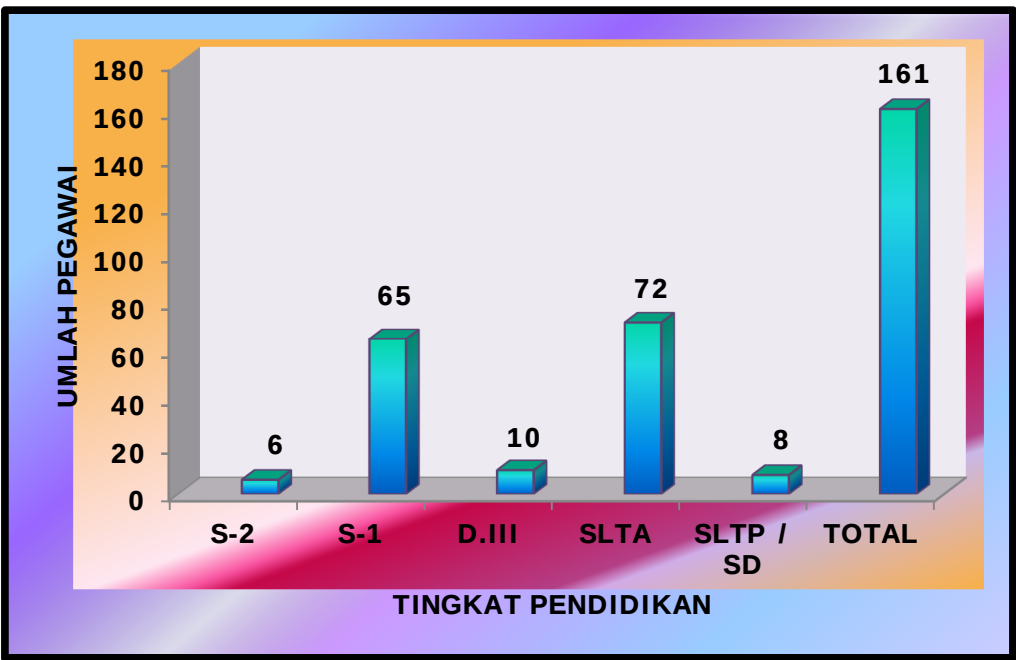
a. Berdasarkan Golongan



Gambar 2.2. Grafik Pegawai Berdasarkan Golongan

Dari grafik gambar 2.2. di atas ini terlihat dengan jelas sumber daya pegawai berdasarkan golongan di atas sebagian besar (73,29%) pegawai Dinas Perindag Provinsi Jambi pada Tahun 2010 adalah golongan III. Untuk pegawai yang bergolongan IV memiliki presentase (8,07%). Sedangkan pegawai dengan golongan II memiliki presentase (16,77%) dan golongan I memiliki presentase (1,86%) dari keseluruhan pegawai.

b. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

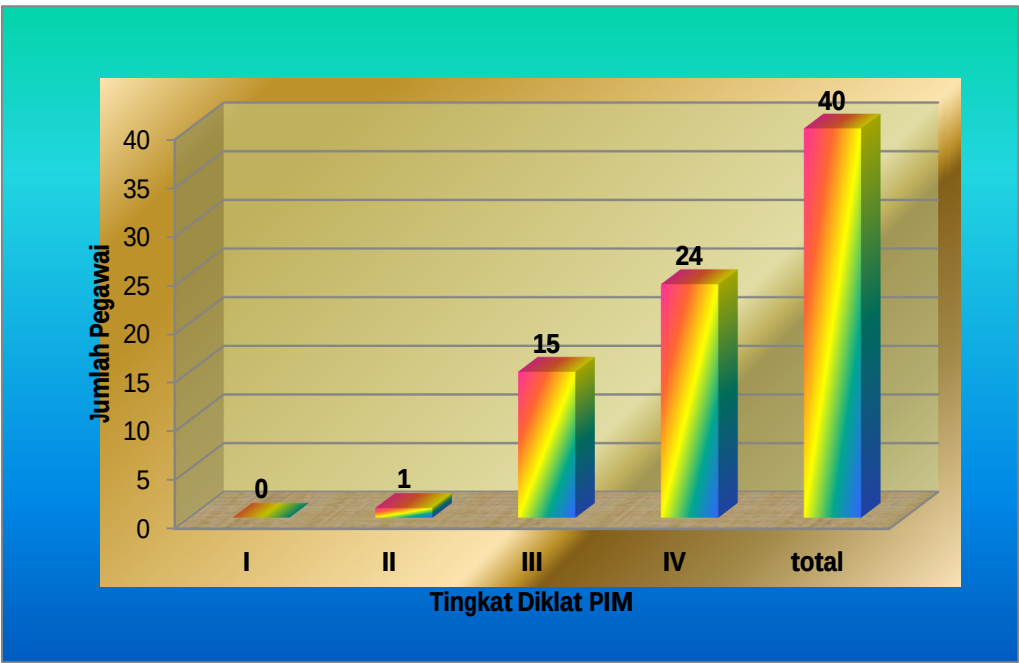


Gambar 2.3. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa (40,37%) pegawai Dinas Perindag Provinsi Jambi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana (S-1) dan (3,73%) memiliki latar belakang pendidikan hingga Pasca Sarjana (S-2). Dengan demikian, (44,10%) dari pegawai Dinas Perindag Provinsi Jambi berpendidikan sarjana. Selebihnya sekitar (55,90%) adalah non sarjana.

c. Berdasarkan Tingkat Pendidikan Non Formal

Memperhatikan gambar dibawah ini menunjukan bahwa pegawai Disperindag Provinsi Jambi yang telah mengikuti Diklat PIM IV sebanyak 14,91 %, Diklat PIM III sebanyak 0,32 % dan Diklat PIM II sebanyak 0,63 % dari total keseluruhan pegawai sebanyak 161 orang.

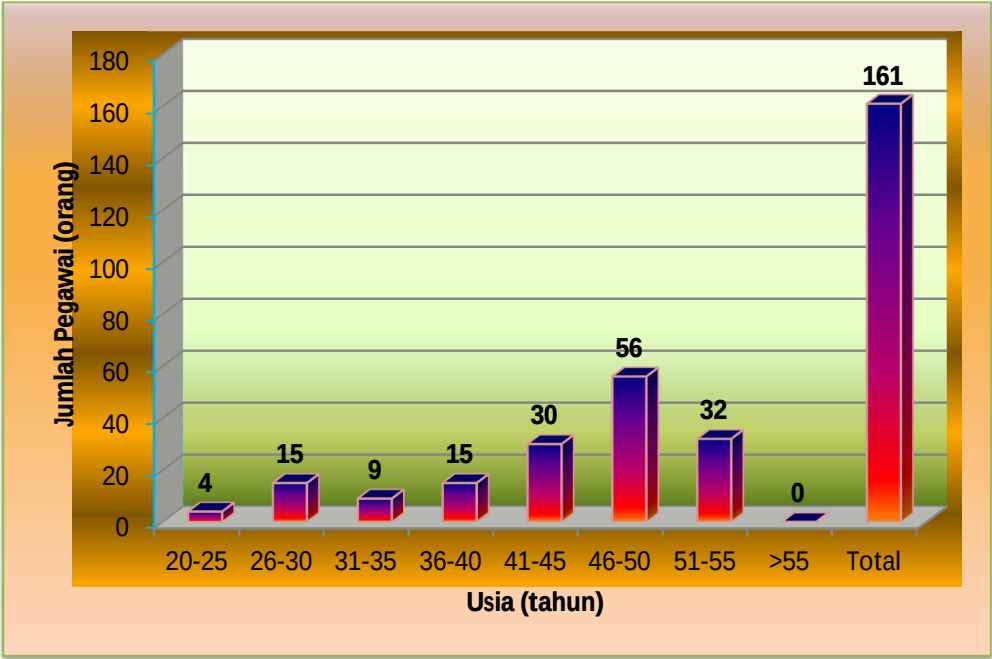


Gambar 2.4. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Diklat PIM/struktural

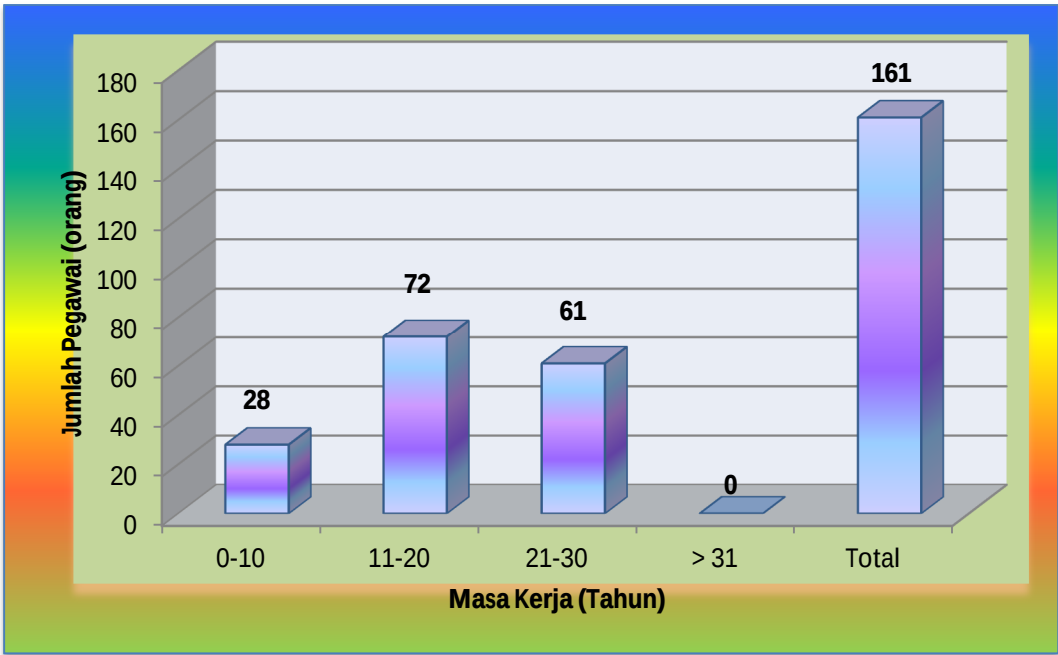
d. Berdasarkan Usia

Pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada akhir Desember 2010 sebagaimana gambar dibawah ini memperlihatkan bahwa terdapat 2,49% pegawai dengan usia 20-25 tahun, 9,32 % pegawai dengan usia 26 – 30 tahun, 5,6 % pegawai dengan usia 31-35 tahun, 9,32 % pegawai dengan usia 36-40 tahun, 18,63 % pegawai dengan usia 41-45 tahun, 34,79 % pegawai dengan usia 46-50 tahun, dan 19,88 % pegawai dengan usia 51- 55 tahun. Grafik pegawai berdasarkan Usia dapat dilihat pada gambar 2.5 dibawah ini :

Gambar 2.5. Grafik Pegawai Berdasarkan Usia



e. Berdasarkan Masa Kerja

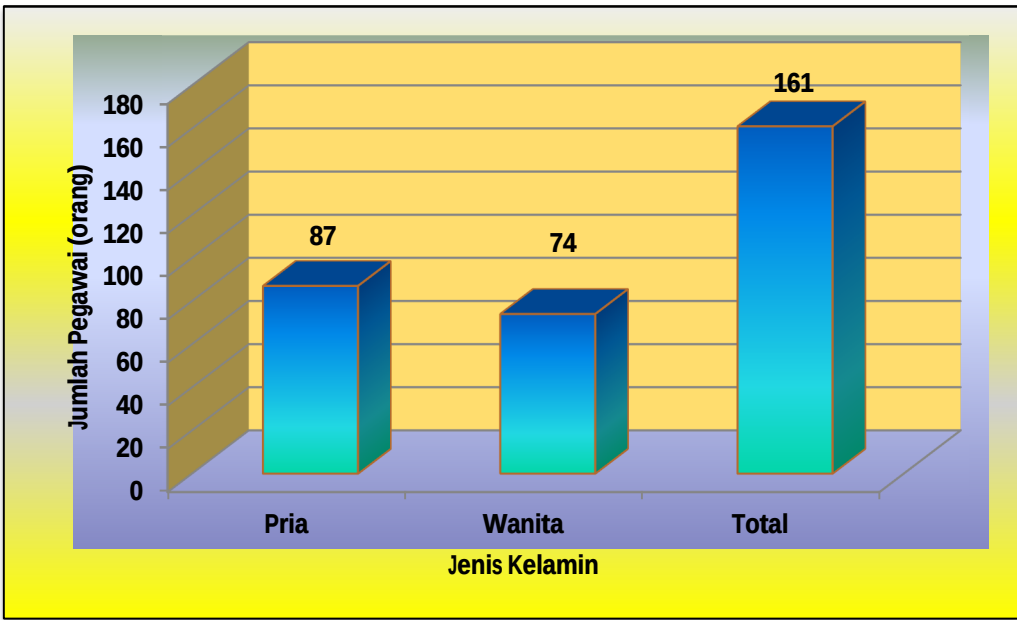


Gambar 2.6. Grafik Pegawai Berdasarkan Masa Kerja

Dari grafik di atas, terlihat bahwa sebagian besar pegawai Disperindag Provinsi Jambi memiliki masa kerja antara 11-20 tahun serta 21-30 tahun. Ini berarti banyak pegawai dengan pengalaman yang cukup (21-30 tahun) serta banyak pula pegawai yang pengalamannya masih minim (0-10 tahun). Untuk meminimalkan gap pengalaman antar dua golongan tersebut, diupayakan pembinaan pegawai yang maksimal untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai baru, diantaranya melalui penyertaan diklat, magang

serta bentuk pengembangan pegawai lainnya yang sesuai dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Disperindag Provinsi Jambi.

f. Berdasarkan Jenis Kelamin

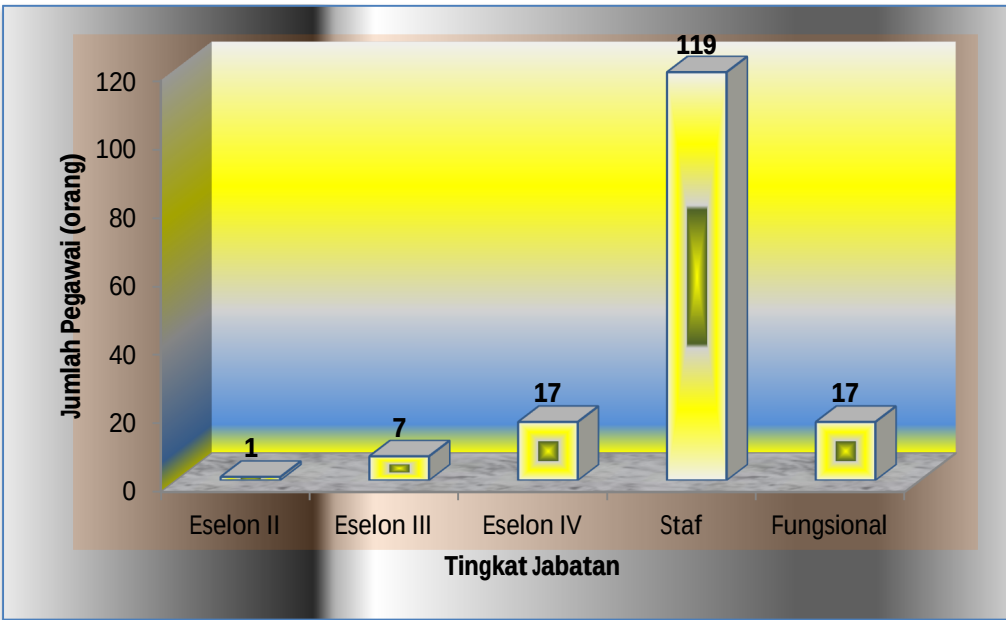


Gambar 2.7. Grafik Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Mencermati data yang tertera pada gambar diatas ini terlihat bahwa (54,04%) pegawai Dinas Perindag Provinsi Jambi adalah pria dan (45,96%) terdapat pegawai wanita. Dikarenakan institusi Dinas Perindag Provinsi Jambi merupakan institusi teknis yang mengharuskan latar belakang pendidikan tertentu, maka pegawai pria dan wanita di Dinas Perindag Provinsi Jambi memperoleh perlakuan yang setara serta memiliki kesempatan yang sama dalam berkarir. Hal ini dibuktikan dengan adanya 2 (dua) pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon III dan 7 (tujuh) pegawai wanita yang menduduki jabatan eselon 4.

g. Berdasarkan Tingkat Jabatan

Dilihat dari gambar dibawah ini, selain jabatan struktural di lingkup Dinas Perindag Provinsi Jambi sebesar 89,44%, sebagian pegawai juga memiliki jabatan fungsional sebesar 10,56%.



Gambar 2.8. Grafik Pegawai Berdasarkan Tingkat Jabatan

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana saat ini yang tersedia di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan Desember 2010 sebagaimana pada tabel 2.1. dibawah ini :

Tabel 2.1. Sarana dan Prasarana Kerja Disperindag Provinsi Jambi

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah	Keterangan
A.	BANGUNAN DAN GEDUNG		
	- Gedung Kantor Disperindag Provinsi Jambi	1 Unit	Tahun 1972 Luas 716 m2
	- Rumah Dinas (Kepala)	1 Unit	Tahun 19972 Luas 120 m2
	- Rumah Dinas	11 buah	Tahun 1972-1984 Total Luas 940 m2
	- Gedung UPTD Metrologi	1 Unit	Tahun 1985 Luas 700 m2
	- Gedung UPTD BPSMB	1 Unit	Tahun 1985 Luas 1000 m2
	- Tempat Beribadah	1 Unit	Luas 36 m2
B.	PERALATAN DAN MESIN		
	Alat angkutan kendaraan roda 4		
	- Toyota Kijang Super	3 Unit	Tahun 1991, 1992
	- Toyota Kijang Rover	1 Unit	Tahun 1992
	- Toyota Kijang Pick Up	1 Unit	Tahun 1991
	- Mitsubishi Truk Box	1 Unit	Tahun 1992
	- Mitsubishi L.300 Pick Up	1 Unit	Tahun 1991
	- Toyota Kijang Inova	2 Unit	Tahun 2005 dan 2010
	- Toyota Kijang Avanza	1 Unit	Tahun 2010
	Alat angkutan kendaraan roda 2		
	- Suzuki Famili	1 Unit	Tahun 1992
	- Vespa Exsel	1 Uni	Tahun 1992
	- Yamaha L.2 Super	1 Unit	Tahun 1992
	- Honda C.86	1 Unit	Tahun 1992
	- Yamaha RXS	1 Unit	Tahun 1993
	- Yamaha F1Z	1 Uni	Tahun 1994
	- Yama Alfa	3 Unit	Tahun 1994
	- Honda GL Pro	1 Unit	Tahun 1995

- Suzuki TRS	1 Unit	Tahun 1995
- Honda Astrea	2 Unit	Tahun 1996 dan 2004
- Honda Supra X	7 Unit	Tahun 2004, 2005, 2006, 2007 dan 2008
- Supra X 125	2 Unit	Tahun 2010
- Suzuki Smash	1 Unit	Tahun 2010
Alat Bengkel dan Alat Ukur		
- Mesin Bubut	1 Buah	Tahun 1998
- Alat Ukur	2 buah	Tahun 2002, 2009
- Perkakas Bengkel	4 Unit	Tahun 2006-2009
Alat Kantor dan Rumah Tangga		
- Meja Biro	44 Unit	
- Meja Rapat	2 Unit	Tahun 1975-2010
- Lemari Arsip	22 Unit	Tahun 1976-1998
- Lemari Besi	4 Unit	Tahun 1976-2009
- Lemari kayu	2 Unit	Tahun 1981-2008
- Meja Telpon	2 Unit	Tahun 1994-2009
- Filling Besi/MetalFiling Cabinet	24 Unit	Tahun 1996-1998
- Kursi Biasa	35 Unit	Tahun 1980-2006
- Kursi Lipat	15 Unit	Tahun 1980-2004
- Kursi Tamu	8 Unit	Tahun 1983-2009
- Kursi Kerja	4 Unit	Tahun 1996-2009
- Kursi Hidrolik	7 Unit	Tahun 2009-2010
- Kipas Angin	20 Unit	Tahun 2010
- Printer	29 unit	Tahun 1998-2010
- AC Split	14 unit	Tahun 1980-1999
- AC Window	6 Unit	Tahun 1980 -2010
- PC Unit	8 Unit	Tahun 1995-2008
- CPU	14 Unit	Tahun 1996-2010
- Meja Tamu	1 Unit	Tahun 1995-2009
- Stabilizer	9 Unit	Tahun 1997-2009
- Meja Komputer	15 Unit	Tahun 1998
- Kursi Putar	20 Unit	Tahun 1986-2009
- Brankas	6 Unit	Tahun 1986-2009
- Komputer PC	5 Unit	Tahun 1992-2009
- Laptop	8 Unit	Tahun 2010
Alat Studio dan Komunikasi		
- Faxsimile	3 buah	Tahun 1999-2010
- Pesawat Telpon	4 buah	Tahun 1994 1995, 2010
- Handy Cam	2 buah	Tahun 1998,2002, 2009
- Peralatan Studio Visual Lain2	1 set	Tahun 2008, 2010 Tahun 2007
Alat-Alat laboratorium		
- Alat laboratorim UPTD Kemetrolagian dan BPSMB	168 item	Tahun 1979-2010
Alat-Alat Keamanan		
- Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	1 buah	Tahun 1998

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Perkembangan Kinerja Disperindag Provinsi Jambi Tahun 2006-2010

Pembangunan Bidang Industri dan Perdagangan selama satu dasawarsa terakhir telah mewarnai perjalanan perekonomian nasional dan tidak terlepas pula akibat yang ditimbulkan dari dampak terjadinya krisis moneter yang pernah melanda Bangsa Indonesia beberapa tahun silam, yang kemudian berdampak luas terhadap perekonomian daerah secara menyeluruh, utamanya sektor-sektor *vital* yang kemudian menekan pertumbuhan ekonomi menjadi negatif. Namun demikian dengan

upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh komponen bangsa dan elemen masyarakat, secara bertahap krisis yang dihadapi dapat dilalui dan secara perlahan pertumbuhan ekonomi nasional mengalami pertumbuhan positif.

Provinsi Jambi yang merupakan salah satu wilayah strategis memiliki potensi yang cukup besar dalam mendorong peningkatan pertumbuhan sektor industri dan perdagangan, mengingat posisi strategis Provinsi Jambi yang berhadapan langsung dengan segitiga pertumbuhan dan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapura *Growth Triangle*), hal ini tentu akan membuka peluang dan kesempatan bagi daerah dalam mewujudkan visi dan misi Jambi menuju JAMBI EMAS 2015, yaitu Ekonomi Maju Aman, Adil dan Sejahtera.

Namun demikian, dengan posisi tersebut hal ini menjadi peluang sekaligus menjadi tantangan dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif, karena untuk produk-produk lokal yang masuk dalam pasar tersebut akan berhadapan langsung dengan produk-produk yang berasal dari berbagai negara, sehingga akan sangat berpengaruh terhadap pasar domestik. Oleh karenanya diperlukan strategi dalam mendorong industri perdagangan untuk meningkatkan daya saing produk yang kita miliki.

Dalam sisi perdagangan domestik, regional maupun internasional, Provinsi Jambi memiliki infrastruktur jalan dan pelabuhan yang perlu menjadi perhatian serius, terutama dalam menunjang kinerja ekspor-impor Provinsi Jambi terutama produk unggulan dan industri hasil pengolahan, seperti Karet, CPO, batubara dan produk hortikultura lainnya. Produk-produk hilir industri olahan tersebut, kedepan menjadi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Sebagai salah satu daerah penyumbang terbesar hasil produk perkebunan karet yang telah merambah pasar ekspor dunia, hal ini tentu ke depan perlu upaya secara kongkrit melalui kebijakan mendorong pengembangan industri hilir karet melalui berbagai program-program strategis.

Tercatat bahwa nilai ekspor Jambi pada tahun 2010 masih didominasi oleh karet dan barang dari olahan karet sebesar US\$ 734,92 juta kemudian diikuti pertambangan (BBM) sebesar US\$ 328,87 juta, namun nilai tambah (*value added*) yang masih rendah, sehingga kondisi ini tentunya akan berpengaruh terhadap *multiplier effect* dari komoditi ekspor tersebut seperti penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan harga komoditi dan penerimaan daerah. Sementara itu, negara tujuan ekspor Jambi mayoritas ke negara Singapura sebesar US\$ 330,38 juta, kemudian Jepang US\$ 163,36 juta dan China sebesar US\$ 151,95. Sementara itu produk-produk industri hilir Sawit (CPO) juga harus terus didorong dan dikembangkan menjadi industri olahan lainnya, sehingga tidak saja menghasilkan CPO sebagai industri hilir-nya, akan tetapi industri ikutan lainnya yang berasal dari limbah industri yang dihasilkan oleh perkebunan sawit.

Kedua komoditi unggulan tersebut, harus menjadi kekuatan utama perekonomian Provinsi Jambi dari sektor non migas, disamping Industri mineral dan sektor migas lainnya, tujuannya dalam upaya meningkatkan ekspor, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat, khususnya para petani.

Dilain sisi, untuk meningkatkan daya saing produk terutama dalam pasar ekspor, adalah pengembangan standardisasi melalui uji dan mutu kualitas produk, sehingga mampu bersaing dengan lebih baik. Dalam perdagangan global pengakuan terhadap suatu produk didasarkan kepada hasil uji mutu terhadap barang-barang yang akan diperdagangkan, serta memiliki sertifikasi yang diakui nasional, meskipun untuk produk-produk ekspor yang telah merambah pasar global diakui telah memenuhi persyaratan uji mutu, namun pengembangan standardisasi ke depan harus terus dikembangkan.

Dalam sistem perdagangan bebas, proteksi terhadap pembatasan keluar-keluarnya barang-barang sudah tidak memungkinkan, kecuali barang-barang tertentu yang sudah diatur tata niaganya, hal ini tentu diperlukan strategi terutama dalam memberikan perlindungan kepada konsumen dan pengawasan terhadap barang-barang yang beredar di pasaran. Penggunaan produk-produk yang tidak memiliki standar dan persyaratan yang dapat membahayakan keamanan dan kesehatan bagi konsumen, juga menjadi bagian penting dalam upaya perlindungan konsumen. Keluar masuknya barang-barang yang begitu cepat, terutama ke wilayah Provinsi Jambi karena posisi yang strategis tersebut diperlukan upaya komperehensip dan sinergitas antara semua pihak dan stoke holder untuk melakukan upaya pengawasan sesuai tingkatannya.

Dalam bidang industri kecil, pengembangan dan pemberdayaan sektor ini menjadi basis utama untuk mendorong ekonomi kerakyatan, terbatasnya aksesibilitas dalam meningkatkan kemampuan industri kecil sudah menjadi tantangan tersendiri, namun demikian industri kecil telah membuktikan bahwa secara nyata dinilai lebih tangguh dan mampu bertahan dalam situasi krisis yang pernah dihadapi, dibanding industri menengah dan besar. Kekhususan karakter yang dimiliki industri kecil, tentu perlu terus menjadi perhatian secara khusus dalam memperkuat kelembagaannya, utamanya dalam membantu memfasilitasi akses permodalan, bantuan peralatan dan penguasaan teknologi, SDM, kualitas produk, market yang lebih luas, dan manajemen industri kecil, serta pembinaan dan pelatihan kepada pengerajin kecil secara berkesinambungan, terlebih lagi Provinsi Jambi yang memiliki keunggulan dalam berbagai industri kerajinan yang telah merambah pasar-pasar domestik, serta membantu secara aktif lembaga-lembaga terkait dalam pengembangan industri kecil kerajinan dan industri kreatif lainnya.

1. Industri

a. Kontribusi Industri Terhadap Ekonomi Provinsi Jambi

Sampai dengan tahun 2010, sektor Industri Pengolahan merupakan penyumbang ke 3 terhadap perekonomian Provinsi Jambi (PDRB) yaitu sebesar Rp. 5.979.007,04 atau 11,11 %, sedangkan penyumbang pertama yaitu Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan perikanan sebesar Rp.15.905.977,21 atau 29,56 % diikuti sector Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp. 12.113.078.49 atau 18,12 %. Dari tahun 2008 sampai dengan 2010 sektor Industri Pengolahan memberikan rata-rata sebesar 6,86%. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Jambi tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Berdasarkan Harga Berlaku Provinsi Jambi tahun 2008-2010

No.	Lapangan Usaha	2008	2009 *)	2010**)
1.	Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	9 791 984,59	12 113 078,49	15 905 977,21
2.	Pertambangan dan Penggalian	10 525 760,03	8 078 598,67	9 750 652,14
3.	Industri Pengolahan	4 568 278,28	5 258 204,53	5 979 007,04
4.	Listrik, gas dan air bersih	329 358,89	368 042,76	479 775,79
5.	Konstruksi	1 771 855,3	2 146 259,89	2 446 569,48
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5 647 973,07	6 428 163,34	7 827 567,5
7.	Pengangkutan dan Komunikasi	2 604 261,69	3 040 654,85	3 517 311,76
8.	Keuangan, Real Estate & Jasa	1 805 765,74	2 283 432,59	2 767 318,34
9.	Jasa-jasa	4 011 245,96	4 410 570,52	5 142 513,77
	PRODUK DOMESTIK BRUTO	41 056 483,55	44 127 005,65	53 816 693,03

Sumber : BPS Provinsi Jambi
*) Angka Sementara, **) Angka Sangat sementara

Industri pengolahan non migas menunjukan kondisi tidak stabil sebagaimana dilihat pada tabel 1.2. Dari tabel tersebut terdapat 2 industri yang tidak mengalami pertumbuhan antara lain industry tekstil, barang, kulit dan alas kaki sebesar 0,06 % dan industry pupuk, kimia & barang dari karet sebesar 0,25 % , sedangkan industry lainnya mengalami penurunan dan kenaikan yang tidak terlalu signifikan.



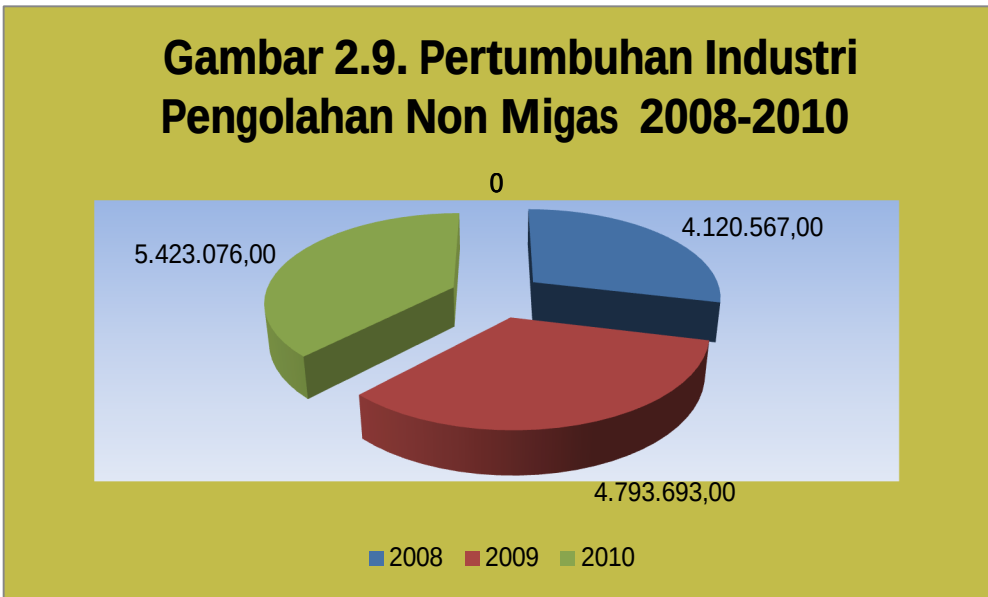
**Tabel 2.3. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas
Provinsi Jambi tahun 2008-2010**

No.	Lapangan Usaha	2008	2009 *)	2010**)
1.	Makanan, Minuman dan Tembakau	1.486.423,21	1 858 056,36	2 123 090,88
2.	Tekstil, Barang, Kulit dan Alas kaki	24.556,25	27 281,49	30 489,9
3.	Barang, Kayu dan hasil hutan lainnya	2 107 954,45	2 348 758,13	2 614 127,52
4.	Kertas dan barang cetakan	198 001,06	218 640,35	256 820,85
5.	Pupuk. Kimia dan barang dari karet	100 054,78	112 098,51	133 746,89
6.	Semen dan barang galian non logam	132 865,93	147 770,17	172 780,61
7.	Logam dasar , besi dan baja	0,00	0,00	0,00
8.	Barang dari logam, mesin dan peralatannya	21 841,29	24 314,66	27 919,46
9.	Barang lainnya	48 870,93	56 773,93	64 100,26
	Total Industri pengolahan Non Migas	4 120 567,89	4 793 693,61	5 423 076,38

Sumber : BPS Provinsi Jambi

*) Angka Sementara, **) Angka Sangat sementara

Perkembangan Pertumbuhan Industri Pengolahan Non Migas 2008-2010 dapat dilihat pada Gambar 2.9.



b. Pembinaan Industri Kecil

Program pembinaan terhadap industri dilakukan baik terhadap industri besar, menengah maupun kecil. Untuk program pembinaan industri besar Pemerintah daerah hanya sebagai fasilitator karena industri besar telah memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri. Sedangkan program prioritas dari sektor industri adalah industri kecil kerajinan yang masih memiliki kelemahan dan perlu dibina secara berkelanjutan. Pembinaan terhadap industri kecil difokuskan pada kegiatan keterampilan SDM, peningkatan produksi, pemanfaatan SDA, penerapan teknologi yang tepat

guna, bantuan peralatan, permodalan, perbaikan kemasan, pengembangan potensi pasar dan pengembangan kewirausahaan.

b. Perkembangan Industri Kecil (IK)

Jumlah usaha Industri Kecil (IK) di Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar 17.800- unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2009 berjumlah 16.318 unit usaha, berarti meningkat sebesar 1.482 unit usaha atau 9,08%. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) jumlah usaha IK mengalami peningkatan dari 15.245 unit usaha (awal tahun 2006) menjadi 17.800 unit usaha (akhir tahun 2010) dengan rata-rata peningkatan sebesar 511 unit usaha atau 3,35 %.

Penyerapan tenaga kerja usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2010 sebesar 48.400 orang, dibandingkan tahun 2009 sebesar 47.823 orang, berarti meningkat sebesar 577 orang atau 1,21 %. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) juga mengalami peningkatan yaitu dari 44.695 orang (awal tahun 2006) menjadi 48.400 orang (akhir tahun 2010), rata-rata peningkatan pertahun 741 orang atau 1,68%.

Nilai Investasi yang terserap pada usaha Industri Kecil pada tahun 2010 sebesar Rp. 54.967.075,- dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp. 53.916.548,-berarti meningkat sebesar Rp.1.050.527,- atau 1,95%. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010), nilai investasi usaha Industri Kecil (IK) mengalami peningkatan dari Rp. 50.731.679,- (awal tahun 2006) menjadi Rp. 54.967.075,-(akhir tahun 2010), rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp.847.079,- atau 1,67%.

Nilai produksi usaha Industri Kecil (IK) pada tahun 2010 sebesar Rp. 192.865.650,- dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp.186.365.650,- berarti meningkat sebesar Rp.6.500.00,- atau 3,49%. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) nilai produksi usaha industri kecil mengalami peningkatan dari Rp.167.104.984,- (awal tahun 2006) menjadi Rp.192.865.650,- (akhir tahun 2010), rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp. 5.152.133,- atau 3,08%. Perkembangan industri kecil di Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Perkembangan Industri Kecil di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp. 000)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Produksi (Rp.000)
2006	15.245	50.731.679	44.695	167.104.984
2007	15.720	51.252.830	46.036	172.118.126
2008	16.169	51.147.861	46.336	177.491.381
2009	16.318	53.916.548	47.823	186.365.650
2010	17.800	54.967.075	48.400	192.865.650



c. Perkembangan Industri Menengah dan Besar (IMB)

Jumlah usaha IMB di Provinsi Jambi pada tahun 2010 sebesar 86 unit usaha. Jika dibandingkan tahun 2009 berjumlah 86 unit usaha, berarti tidak ada peningkatan di unit usaha. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) jumlah usaha IMB mengalami penurunan dari 105 unit usaha (awal tahun 2006) menjadi 86 unit usaha (akhir tahun 2010) dengan rata-rata penurunan sebesar 3,8 unit usaha atau minus 18,9%.

Penyerapan tenaga kerja usaha IMB pada tahun 2009 sebesar 7.845 orang, dibandingkan tahun 2010 sebesar 4.061 orang, berarti menurun menjadi sebesar 3.784 orang atau minus 48,24 %. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) juga mengalami peningkatan dan penurunan yaitu dari 7.981 orang (awal tahun 2006) menjadi 4.061 orang (akhir tahun 2010). Penurunan ini disebabkan karena berkurangnya jumlah industri Menengah dan Besar akibat tidak berproduksinya industry pengolahan kayu yang kekurangan bahan baku.

Nilai Investasi yang terserap pada usaha IMB pada tahun 2009 sebesar Rp. 2.443.427.438,-dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp. 6.897.161.546,- berarti meningkat sebesar Rp. 4.553.734.108,-atau 186,40%. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010), nilai investasi usaha IMB mengalami peningkatan dari Rp. 2.313.558.385,- (awal tahun 2006) menjadi Rp. 6.897.161.546,- (akhir tahun 2010), rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp 916.720.832,- atau 39,63%.

Nilai produksi usaha IMB pada tahun 2009 sebesar Rp.2.750.355.112,- dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp.2.827.860.380,- berarti meningkat sebesar Rp.77.505.268,- atau 2,82%. Selama kurun waktu lima tahun (2006-2010) nilai produksi usaha industri kecil mengalami peningkatan dari Rp.2.455.866.609,- (awal tahun 2006) menjadi Rp.2.827.860.380,- (akhir tahun 2010), rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp. 371.993.771,- atau 15,15%. Perkembangan Industri Menengah dan Besar di Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5. Perkembangan Industri Menengah dan Besar di Provinsi Jambi

Tahun	Jumlah Perusahaan	Investasi (Rp. 000)	Tenaga Kerja (orang)	Nilai Produksi (Rp.000)
2006	105	2.313.558.385	7.981	2.455.866.609
2007	93	2,443.427.438	9.133	2.607.147.992
2008	84	2,443.427.438	9.103	2.684.085.858
2009	86	2,443.427.438	7.845	2.750.355.112
2010	86	6.897.161.546	4.061	2.827.860.380



2. Perdagangan

Peran sector perdagangan semakin penting dalam perekonomian Provinsi Jambi baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas pentingnya peran sector perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) sector perdagangan, hotel dan restoran. Nilai tambah sector perdagangan, hotel dan restoran selama periode 2006-2010 menunjukkan peningkatan positif dari tahun ke tahun yaitu Rp. 4.265.670,37,- pada tahun 2006 menjadi Rp. 7.827.567,5,- pada tahun 2010, rata-rata peningkatan pertahun sebesar Rp. 712.379,4 atau 16,70%.

Secara kualitas, semakin pentingnya sector perdagangan terlihat dari kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendorong sector industry, pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan dll. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap peningkatan kontribusi sector perdagangan.

A. Perdagangan Dalam Negeri

a. Perkembangan Usaha Perdagangan

Jumlah unit usaha perdagangan di Provinsi Jambi pada tahun 2009 tercatat 24.497 unit usaha, jika dibandingkan tahun 2010 sejumlah 25.650 unit usaha, berarti mengalami kenaikan sejumlah 1.153 unit usaha atau 4,71%.

Selama kurun waktu 2006-2010, perkembangan usaha perdagangan di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6. Perkembangan Usaha Perdagangan di Provinsi Jambi

No.	Tahun	Pedagang Kecil (PK)	Pedagang Menengah (PM)	Pedagang Besar (PB)	Jumlah
1.	2006	17.272	2.473	939	20.338
2.	2007	18.428	2.786	1.228	21.751
3.	2008	19.436	3.053	1.243	23.221
4.	2009	20.458	3.183	1.317	24.497
5.	2010	21.817	3.927	1.328	25.650

b. Perkembangan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

Jumlah unit usaha perdagangan di Provinsi Jambi pada tahun 2009 berdasarkan penerbitan SIUP tercatat 4.648 unit usaha, jika dibandingkan tahun 2010 sejumlah 5.081 unit usaha, berarti mengalami kenaikan sejumlah 433 unit usaha atau 9,32%.

Selama kurun waktu 2006-2010, perkembangan usaha perdagangan berdasarkan penerbitan SIUP di proyeksikan mengalami peningkatan dan



penurunan. Adapun perkembangan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Provinsi Jambi sebagaimana tabel 2.7.

Tabel 2.7. Perkembangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Di Provinsi Jambi

No.	Tahun	S I U P				Jumlah
		Pedagang Kecil (PK)	Mikro	Pedagang Menengah (PM)	Pedagang Besar (PB)	
1.	2006	2.762	-	367	303	3.432
2.	2007	3.262	-	587	177	4.026
3.	2008	1.940	-	393	136	2.469
4.	2009	3.885	-	565	198	4.648
5.	2010	4.295	104	458	224	5.081

c. Perkembangan Penerbitan tanda Daftar Perdagangan (TDP)

Jumlah unit usaha perdagangan di Provinsi Jambi pada tahun 2009 berdasarkan penerbitan Tanda Daftar Perusahaan tercatat 2. 922 unit usaha, jika dibandingkan tahun 2010 sejumlah 2.922 unit usaha, berarti penerbitan TDP tidak mengalami kenaikan.

Selama kurun waktu 2006-2010, perkembangan penerbitan TDP di Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.8.

Tabel 2.8. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) di Provinsi Jambi

No.	Tahun	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)						Jumlah
		PT	Koperasi	CV	Firma	PO	BUL	
1.	2006	394	62	1.297	1	2.356	4	4.114
2.	2007	369	113	1.568	0	1.769	1	2.820
3.	2008	286	60	943	0	1.053	9	2.351
4.	2009	280	98	886	0	1.603	55	2.922
5.	2010	280	98	886	0	1.603	55	2.922

B. Perdagangan Luar Negeri

a. Perkembangan Ekspor

Pada tahun 2009 realisasi ekspor non migas Provinsi Jambi tercatat ; volume ekspor sebesar 793.406.383 Kg dan nilai ekspor US\$.529.064.273,00. Jika dibanding tahun 2010 dimana volume ekspor mencapai 2.028.915.967 Kg dan nilai ekspor US\$.1.209.672.435, berarti Volume dan nilai ekspor mengalami kenaikan masing-masing ; Volume ekspor sebesar 1.235.509.584 Kg atau 155,73%, dan nilai ekspor sebesar US\$.680.608.162 atau 128,65%, namun volume dan nilai ekspor pada tahun 2009 ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2008 dimana volume ekspor tahun 2008 tersebut mencapai 874.098.181 kg atau turun sekitar 9,24% dan nilai ekspor US\$.973.493.362 atau turun sekitar 45,66%.

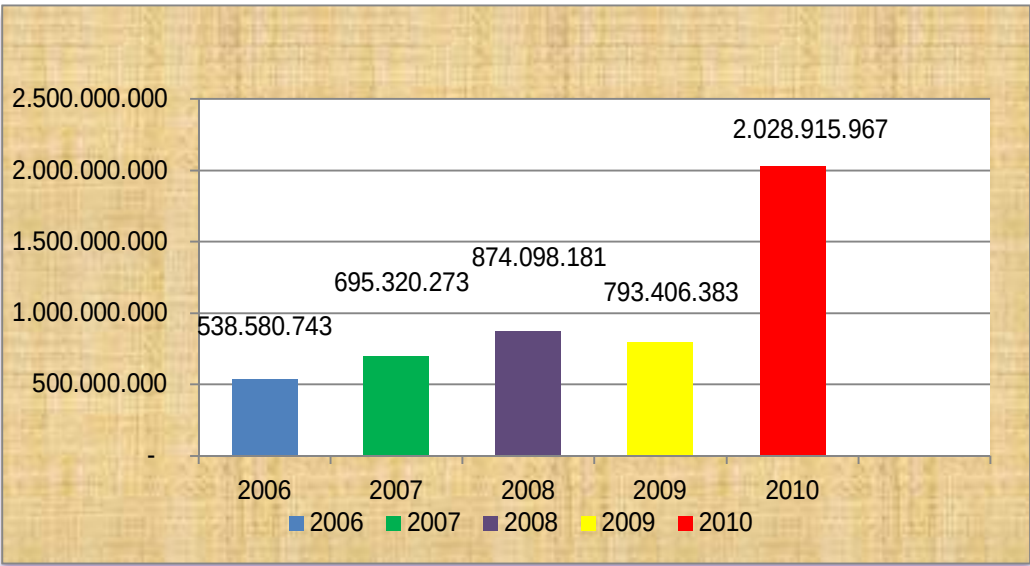


Adapun perkembangan eksor non migas Provinsi Jambi tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 2.9.

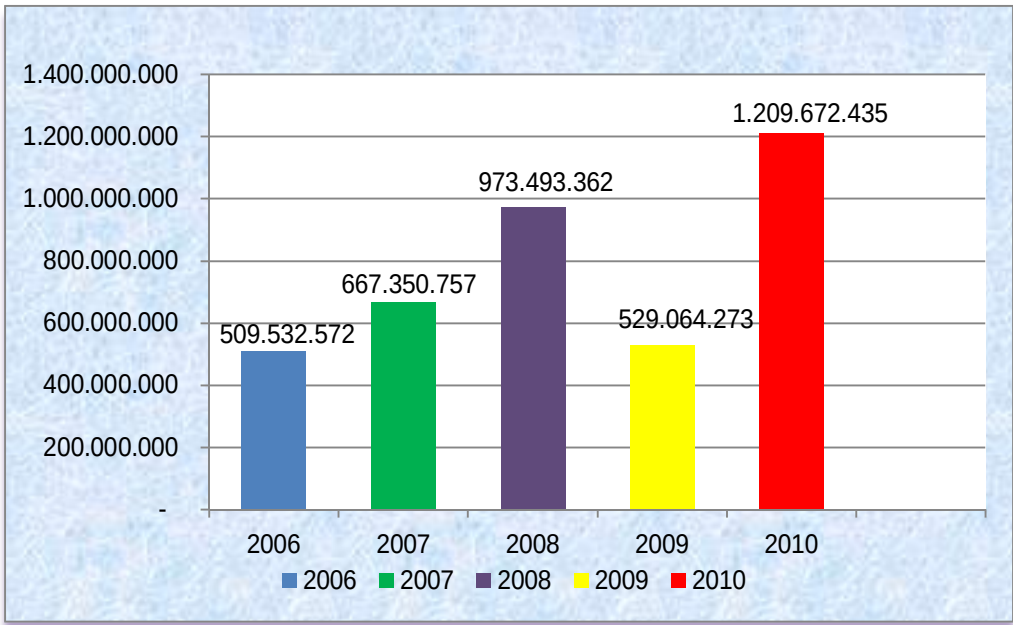
Tabel. 2.9. Perkembangan Ekspor Non Migas di Provinsi Jambi Tahun 2006-2010

No.	Tahun	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1.	2006	538.580.743	509.532.572
2.	2007	695.320.273	667.350.757
3.	2008	874.098.181	973.493.362
4.	2009	793.406.383	529.064.273
5.	2010	2.028.915.967	1.209.672.435

Total Volume dan nilai Ekspor Non Migas Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada gambar 2.10. dan 2.11.



Gambar 2.10. Total Volume Ekspor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010



Gambar 2.11. Total Nilai Ekspor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010

Komoditi ekspor Provinsi Jambi selama kurun waktu 2006-2010 tersebut di dominasi oleh komoditi Karet, Minyak Nabati (CPO dll) dan Pulp dan produk Tissue.

Negara Tujuan ekspor Provinsi Jambi selama kurun waktu 2006-2010 mencapai 80 Negara, dengan 5 negara tujuan utama ekspor Singapura, Malaysia, Jepang, China dan Amerika Serikat.

b. Perkembangan Impor

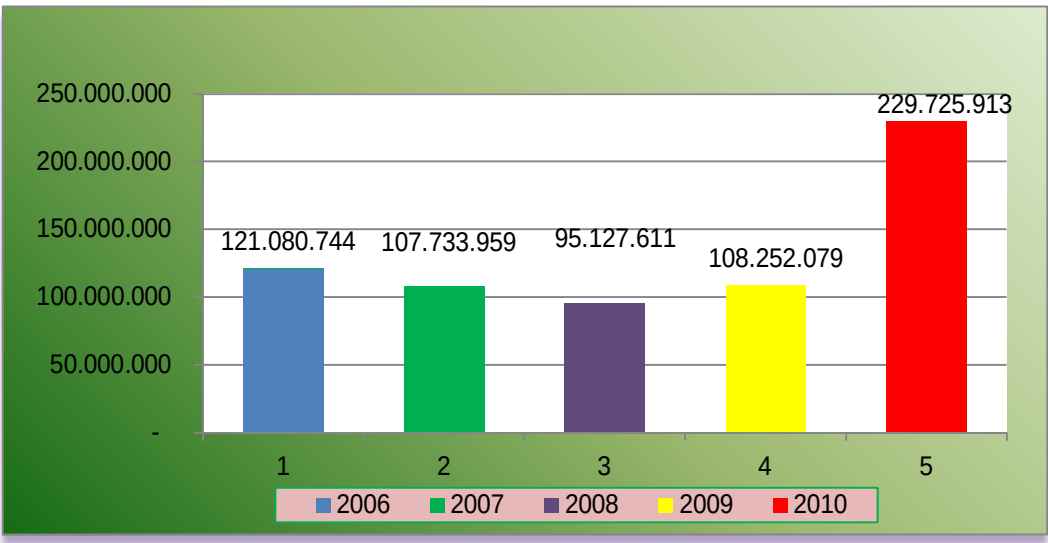
Impor Provinsi Jambi pada tahun 2010, untuk volume mencapai 229.725.913 dan nilai US\$. 230.226.714, Jika dibandingkan tahun 2009, volume mencapai 108.252.079 Kg dan nilai US\$.92.488.616,00. berarti menunjukkan bahwa volume impor mengalami peningkatan sebesar 121.473.834 Kg atau 112,2%. Sedangkan nilai impor sebesar US\$.137.738.098 atau 148,9%.

Selama kurun waktu 2006-2009 Impor Provinsi Jambi mengalami peningkatan dan penurunan masing-masing baik untuk Volume ekspor maupun nilai ekspornya. Adapun perkembangan Impor Provinsi Jambi dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel. 2.10. Perkembangan Impor di Provinsi Jambi

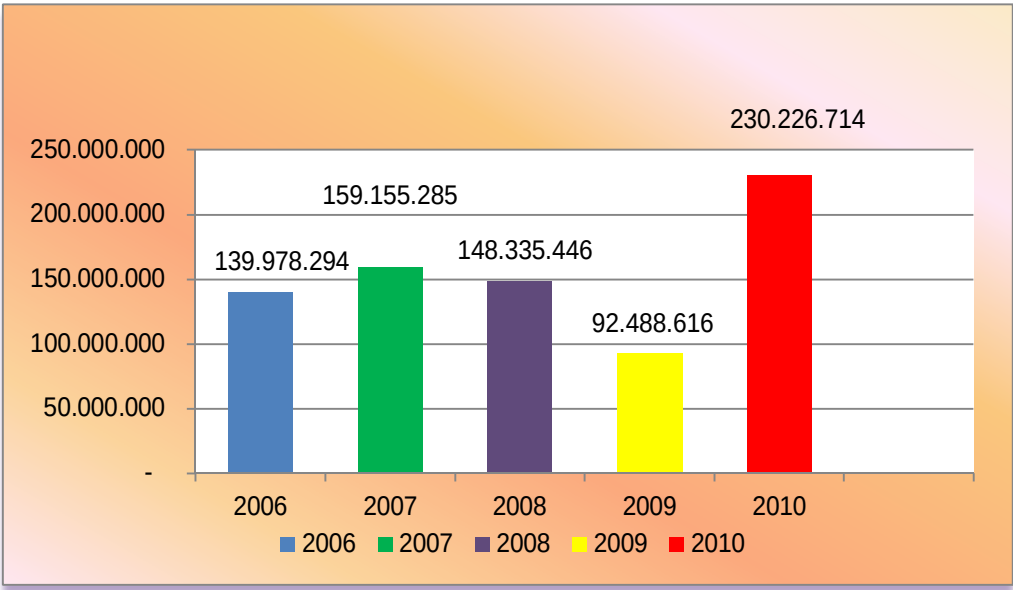
No.	Tahun	Volume (kg)	Nilai (US \$)
1.	2006	121.080.744	139.378.294
2.	2007	107.733.959	159.155.285
3.	2008	95.127.611	148.335.446
4.	2009	108.252.079	92.488.616
5.	2010	229.725.913	230.226.714

Total Volume dan nilai Impor Non Migas Provinsi Jambi Provinsi Jambi Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada gambar 2.12. dan 2.13.



**Gambar 2.12. Total Volume Impor Non Migas Provinsi Jambi
Tahun 2006-2010**





Gambar 2.13. Total Nilai Impor Non Migas Provinsi Jambi Tahun 2006-2010

c. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Sumber penerimaan (PAD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi diperoleh dari Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Kemetrolagian berupa jasa tera alat Ukur Takar Timbangan dan Perlengkapanya (UTTP) dan Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) berupa jasa pengujian mutu barang.

Pada tahun 2010, jumlah PAD yang diterima Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebesar Rp.314.348.535,-. Jika dibandingkan tahun 2009, jumlah penerimaan sebesar Rp. 292.800.500,- berarti meningkat sebesar Rp.21.548.035,- atau 107,36%. Perkembangan penerimaan PAD pada UPTD BPSMB dan UPTD Metrologi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada table 2.11.

Tabel 2.11. Perkembangan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD MBSMB dan Pelayanan Tera/Tera Ulang UPTD Metrologi

No.	Tahun	Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Barang UPTD BPSMB			Penerimaan PAD dari Jasa Pelayanan Tera/Tera ulang alat UTTP pada UPTD Metrologi		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1.	2006	120.000.000	277.732.000	231,45	35.000.000	25.013.325	- 28,53
2.	2007	160.000.000	178.424.000	111,52	50.000.000	94.668.800	89.34
3.	2008	160.000.000	164.975.000	103,11	60.000.000	99.052.550	52,39
4.	2009	160.000.000	177.934.300	111,21	90.000.000	114.866.200	27,63
5.	2010	160.000.000	192.685.850	120,58	102.500.000	121.662.685	18,70

2.3.2. Jenis Pelayanan Dinas Perindag Provinsi Jambi

Kegiatan pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pelaku usaha yang dikelola dan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam era otonomi daerah dan reformasi birokrasi pemerintahan adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian/penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) atau disebut dengan *certificate of Origin (COO)*.

SKA adalah surat keterangan asal barang yang menyatakan barang tersebut diolah dan atau di ekspor dari Indonesia. Tujuannya yaitu sebagai alat pendataan ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan preferensi atau pengurangan bea masuk di Negara tujuan.

- b. Pengujian Mutu Barang

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kelembagaan UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) dalam rangka menjamin kesesuaian mutu produk ekspor sesuai dengan permintaan negara tujuan ekspor,

- c. Pelaksanaan Tera/Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP)

Kegiatan tera/tera ulang UTTP adalah serangkaian proses pemeriksaan/pengujian oleh pegawai yang berhak dengan menandai baik tanda sah, tanda batal maupun surat keterangan tertulis berdasarkan hasil pengujian yang meliputi antara lain : ukuran, takaran, timbangan, perlengkapannya dan pengujian. Kegiatan tera/tera ulang UTTP dilaksanakan oleh Kelembagaan UPTD Balai Pelayanan Kemetrolagian dengan memberikan penyuluhan, bimbingan, pelaksanaan tera, tera ulang dan Pos ukur ulang yang menjangkau semua wilayah Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi. Adapun tujuan pelaksanaan tera/tera ulang UTTP yaitu untuk melindungi kepentingan umum (produsen dan konsumen) dalam transaksi penerimaan barang dan jasa.

2.3.3. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang lingkup dari jenis pelayanan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yaitu :

- a. Pelayanan permintaan SKA dilaksanakan setiap hari kerja dan terkadang hari liburpun dilakukan bila ada permintaan dengan waktu penerbitan SKA selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir (apabila data/informasi SKA benar).

b. Pelayanan Permintaan pengujian mutu barang

Dilaksanakan oleh UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada setiap hari kerja. Hasil Pengujian mutu barang dapat diselesaikan dalam rentang waktu 1 minggu disertai dengan pemberian certificate of origin.

c. Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh UPTD Balai pelayanan kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada setiap hari kerja. Pelayanan kemetrologian ini selain di Kantor Metrologi, juga dilakukan dengan mobil untuk menjangkau ke pelosok Kabupaten Kota dalam Provinsi Jambi.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada Tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 2.12 dan 2.13.

**Tabel 2.12. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Tahun 2006-2010**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2006 (buah)	2007 (buah)	2008 (buah)	2009 (buah)	2010 (buah)	2006 (buah)	2007 (buah)	2008 (buah)	2009 (buah)	2010 (buah)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)
1.	Jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan untuk perusahaan ekspor	-	-	-	500	550	600	650	700	610	660	650	634	1.376	122	120	108,3	97,54	156,6
2.	Jumlah contoh komoditi/alat yang diuji	-	-	-	3.100	3.720	4.462	4.687	4.687	3.256	9.998	8.308	1.180	6.865	105	268,8	186,2	25,2	146,5
3.	Jumlah alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP) yang di tera dan tera ulang	-	-	-	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000	12.736	13.177	11.607	12.957	15.286	181,9	188,2	116,1	129,6	152,9



**Tabel 2.13. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Tahun 2006-2010**

No.	Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2006 (Rp.000)	2007 (Rp.000)	2008 (Rp.000)	2009 (Rp.000)	2010 (Rp.000)	2006 (Rp.000)	2007 (Rp.000)	2008 (Rp.000)	2009 (Rp.000)	2010 (Rp.000)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)	2009 (%)	2010 (%)	Anggaran (%)	Realisasi (%)
1.	Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) untuk Kegiatan ekspor Barang	20	23,5	23,5	25	20,8	20	23,5	23,5	25	20,8	100	100	100	100	100	1,1	1,1
2.	Pelayanan Pengujian Mutu Barang	63,2	64,5	79,9	71	82	61,4	58,8	58,4	64,5	79,3	97,2	91,2	74,1	90,8	96,7	1,14	1,04
3.	Pelayanan Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapan (UTTP)	124.878	178.500	246.750	171.519	281.000	124.000	177.500	245.500	150.722	256.550	99,3	99,5	99,5	87,9	91,3	25	21,42

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKKPD

Didalam mewujudkan sasaran strategis yang ditetapkan perlu memperhatikan lingkungan kerja karena dapat memberikan pengaruh positif terhadap pelaksanaan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Lingkungan kerja diciptakan agar tetap berada dalam keadaan yang kondusif.

Menyikapi hal demikian perlu diketahui dan dicermati kondisi lingkungan kerja pada saat ini dan kondisi lingkungan kerja yang diharapkan dengan menggunakan pendekatan analisis SWOT.

2.4.1. KONDISI SAAT INI

1. Kerjasama dan saling keterkaitan dalam pembinaan dan pengembangan industrialisasi perdagangan dengan para BUMN belum terprogram dan berjalan secara optimal,
2. Sarana dan Fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan pedagang belum memadai,
3. Tugas fungsional yang ada baik dibidang industri maupun perdagangan belum memenuhi formasi kebutuhan yang diharapkan,
4. Sistem dan prosedur kerja yang berkaitan dengan penataan, dan pengelolaan Asset, Kekayaan daerah belum berjalan secara optimal,
5. Tingkat produktivitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal,
6. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relatif terbatas.

2.4.2. KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Optimalisasi pengembangan kerjasama dengan para BUMN dan instansi terkait dalam pembinaan industri dan pedagang dapat dilaksanakan berjalan dengan baik,
2. Berupaya meningkatkan sarana dan fasilitas penunjang dalam pelaksanaan pembinaan serta fasilitasi kepada dunia usaha (industri dan pedagang),

3. Berupaya mendapatkan tambahan formasi tenaga fungsional (penyuluh industri kecil) serta memberdayakan tenaga fungsional yang ada secara maksimal,
4. Memberdayakan serta membangkitkan semangat kerja PNS dalam mengemban tugas pekerjaan, kreatif, inovatif, disiplin dan profesional,
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber pembiayaan yang tersedia (APBD/APBN) untuk melaksanakan program pembangunan disektor industri dan perdagangan.

Berdasarkan hasil analisis dan pencermatan terhadap kondisi Eksternal dan internal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat diidentifikasi faktor kekuatan dan hambatan serta peluang dan ancaman didalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi sebagai berikut :

A. KONDISI EKSTERNAL

1. Peluang

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah,
- b. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM),
- c. Potensi sumber daya alam yang memadai,
- d. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,
- e. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

2. Ancaman

- a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.

- b. Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
- c. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (Entrepreneurship),
- d. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah,
- e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
- f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

B. KONDISI INTERNAL

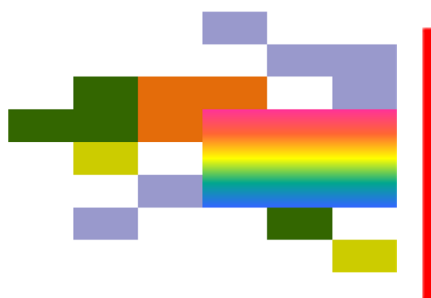
1. Kekuatan

- a. Adanya Tupoksi dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang jelas, terarah dan baku,
- b. Adanya dukungan pembiayaan (APBN/APBD) dan kerjasama stakeholders yang terkait.
- c. Skim Kredit yang dialokasikan dan diperuntukkan bagi pengembangan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM),
- d. Sarana dan fasilitas yang tersedia dapat didayagunakan untuk menampung, memasarkan komoditi hasil-hasil pertanian maupun produk industri pengolahan
- e. Peran serta lembaga swadaya masyarakat (Dekranas, Tim Penggerak PKK) dan instansi pemerintah yang terkait didalam memajukan industri kecil dan kerajinan.

2. Kelemahan

- a. Keterbatasan tenaga fungsional dibidang industri dan perdagangan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan, penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri dan pedagang,
- b. Sikap kemadirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha relatif lemah,

- c. Keterbatasan sarana/prasarana kelembagaan UPTD dilingkungan Dinas Perindag didalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan kepada para pedagang, pelaku eksportir daerah,
- d. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan belum membumi/ masyarakat sampai kepedesaan.



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan

Kondisi lingkungan kerja yang diharapkan tentunya dapat memberikan dukungan optimal terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, program kerja Dinas/Instansi serta stakeholder guna terwujudnya Visi Pembangunan Daerah dan pencapaian sasaran program pembangunan menuju JAMBI EMAS 2011-2015.

Potensi sumber daya alam di Provinsi Jambi (cadangan hutan, kelautan dan perikanan, migas, batubara dll) sangat potensial untuk menumbuhkan kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam. Walaupun telah dicapai berbagai perkembangan yang cukup penting dalam perkembangan industri dan perdagangan, namun dirasakan belum seperti yang diharapkan.

Berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka yang menjadi permasalahan dalam pelayanan di Disperindag Provinsi Jambi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yaitu :

- a. Keterbatasan sarana/prasarana kelembagaan dilingkungan Dinas Perindag Provinsi Jambi di dalam mengakses jangkauan pelayanan dan pembinaan kepada para pedagang, pelaku eksportir daerah.
- b. Disiplin aparatur Dinas Perindag Provinsi Jambi dirasakan masih rendah dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Lemahnya koordinasi dengan para pihak terkait, terutama instansi/SKPD yang terkait langsung dibidang perindustrian dan perdagangan.

Adapun faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut diatas, ini dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu faktor Internal dan faktor eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Internal

- a. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan kegiatan rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industri dan perdagangan diperoleh dari APBD dan APBN yang relative terbatas.
- b. Rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas sebagian staf.
- c. Rendahnya minat baca staf terhadap peraturan perundang-undangan tentang perindustrian dan perdagangan.
- d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk mengatasi berbagai masalah industri dan perdagangan.

2. Faktor Eksternal

- a. Sikap kemandirian dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha masih lemah.
- b. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dan balai riset dalam negeri dengan perusahaan industri dan perdagangan.
- c. Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri.
- f. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap penyelesaian kasus perlindungan konsumen.

Untuk lebih jelasnya Identifikasi permasalahan di Dinas Perindag Provinsi Jambi yang dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsinya, dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut ini :

Tabel 3.1.

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Perindag Provinsi Jambi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Beberapa aspek yang perlu dikaji dalam peningkatan sector industry dan perdagangan yaitu : Sektor Industri a. Peningkatan jumlah unit usaha industri b. Peningkatan penyerapan tenaga kerja industri c. Peningkatan nilai produksi industri d. Peningkatan nilai investasi Sektor Perdagangan a. Peningkatan jumlah unit usaha dagang b. Peningkatan nilai transaksi dagang pasar lelang daerah c. Peningkatan nilai ekspor non migas d. Peningkatan neraca perdagangan daerah e. Peningkatan pengujian mutu komoditi ekspor f. Penerimaan PAD pengujian mutu sampel g. Peningkatan Tera Ulang alat UTTP Ke-Metrologian h. Penerimaan PAD Jasa Kemetrolgian	Perkembangan industri dan perdagangan di Provinsi Jambi pada Tahun 2009 yaitu : 23.554 unit 74.500 orang Rp. 2,882 Triliun Rp. 5,37 Triliun 24.400 unit 7,65 juta 800 US \$Juta +5.987. M 1.175 sampel 160 juta 10.000 unit 90 juta	Untuk pencapaian Aspek yang perlu di kaji dalam peningkatan sector industry dan perdagangan yaitu salah satunya dengan melaksanakan semua strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tahun 2010-2015	a. Sumber pembiayaan dalam melaksanakan tugas rutinitas perkantoran dan pembinaan terhadap usaha industry dan perdagangan diperoleh dari dana APBD dan APBN yang relative terbatas. b. Rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas sebagian staf c. Rendahnya minat baca terhadap peraturan perundangan tentang industri dan perdagangan d. Kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf untuk mengatasi berbagai masalah pertumbuhan industry dan perdagangan	a. Sikap mandiri dan ketangguhan masyarakat dalam berusaha masih lemah. b. Belum terjalinnya komunikasi/hubungan yang intensif antara hasil riset dan balai riset dalam negeri dengan perusahaan industri dan perdagangan c. Kurangnya keberpihakan serta kesadaran masyarakat untuk menggunakan produk dalam negeri d. Masih lemahnya produk hukum terhadap penyelesaian kasus perlindungan konsumen	a. Keterbatasan sarana dan prasarana kelembagaan di lingkup Dinas Perindag dalam mengkses jangkauan pelayanan dan pembinaan kepada pedagang, pelaku eksportir daerah b. Disiplin aparatur Dinas Perindag dirasakan masih rendah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya c. Lemahnya koordinasi dengan pihak terkait yang berkaitan dengan industry dan perdagangan



3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur pada saat kampanye, maka Visi Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2010 – 2015, yaitu :

**“ EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN SEJAHTERA ”
J A M B I E M A S 2015**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2010 -2015 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan Umum.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Optimal dan Berwawasan Lingkungan.
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, menempatkan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan terutama untuk mendukung Misi 3 (tiga) yaitu **“Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri.**

Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan pilihan perindustrian dan perdagangan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Pilihan Perindustrian, melalui program antara lain:

- a. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
- b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah.
- c. Program Penataan Struktur Industri
- d. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

2. Urusan Pilihan Perdagangan, melalui program antara lain :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor.
- b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri.
- c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengaman Perdagangan.
- d. Program Pengembangan Standarisasi Nasional.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tersebut diatas, maka tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Jambi yang terkait dengan hal dimaksud antara lain :

Tugas : Melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perindustrian dan Perdagangan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempunyai *fungsi* yaitu;

1. Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan Umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perindustrian dan Perdagangan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Disperindag Provinsi Jambi dan dikaitkan dengan Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, maka beberapa permasalahan pelayanan yang sampai saat ini masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya antara lain :

1. Keterbatasan tenaga fungsional dibidang industri dan perdagangan dalam mengoptimalkan fungsi pelayanan penyuluhan kepada masyarakat maupun kepada pelaku industri dan pedangan.
2. Sumber-sumber informasi dan pemberitaan yang berkaitan dengan industri dan perdagangan belum membumi/memasyakat sampai kepedesaan.

3. Penerapan system dan mekanisme kerja belum sepenuhnya diatur di dalam SPO yang baku.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur antara lain :

1. Faktor Penghambat

- a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan, dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung kelancaran arus perdagangan barang/jasa dan kegiatan ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan Daerah.
- b. Persaingan dengan produk dari luar yang memiliki keunggulan (pasar bebas),
- c. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi (Entrepreneurship),
- d. Kualitas produk industri kecil dan kerajinan rata-rata masih rendah,
- e. Krisis ekonomi, krisis finansial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor indonesia, termasuk Jambi dalam waktu-waktu lalu,
- f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan, mengakibatkan ekonomi biaya tinggi.

2. Faktor Pendorong

- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dibidang industri dan perdagangan yang bersifat normatif maupun dukungan finansial dalam pelaksanaan program pembangunan industri dan perdagangan di daerah,
- b. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi, iklim usaha dan kemudahan bagi para investor serta kepedulian yang tinggi terhadap keberadaan Usaha Kecil Menengah dan Mikro (UMKM),
- c. Potensi sumber daya alam yang memadai,
- d. Adanya kerjasama Indonesia dengan negara-negara lain dalam bidang ekonomi perdagangan dan investasi baik secara bilateral maupun multilateral dapat mempertahankan pangsa pasar produk menembus pasar global,

- e. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat Jambi untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor dari luar.

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi dapat dilihat pada tabel 3.2. dibawah ini :



Tabel 3.2.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap
Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Jambi

Visi : Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 3 : Meningkatkan perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat Berbasis Agribisnis dan Agroindustri Program : a. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. b. Pengembangan IKM c. Penaatan Struktur Industri d. Peningkatan & Pengembangan Ekspor e. Perlindungan Konsumen dan f. Pengamanan Perdagangan g. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri g. Pengembangan Standarisasi Nasional	a. Keterbatasan tenaga fungsional Dibidang Indag dalam mengopti- Malkan fungsi pelayanan. b. Penerapan system dan meka- nisme kerja belum sepenuhnya Diatur didalam SOP yang baku c. Sumber-sumber informasi dan Pemberitaan yang berkaitan Dengan industry dan perdagang- an belum memasyarakat sampai Ke pedesaan	a. Kondisi infrastruktur daerah (jalan, pelabuhan dan listrik) yang belum memadai untuk mendukung ke- lancaran arus perdagangan barang/jasa & kegiatan Ekspor/impor perdagangan komoditi antara Negara dan daerah b. Persaingan dgn produk luar yg memiliki keunggulan c. Keterbatasan pelaku usaha/pelaku bisnis yg memiliki Jiwa kewirausahaan yang tinggi d. Kualitas produk industry kecil dan kerajinan rata-.rata masih rendah e. Krisis ekonomi, krisis financial global bersifat multi dimensi cukup berdampak terhadap kinerja ekspor f. Praktek KKN dalam dunia usaha masih sulit dihapuskan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi	a. Kebijakan Pemerintah Pusat di bidang Indag bersifat normative dan adanya dukungan financial . b. Komitmenyng tinggi dri Pemda untuk menciptakan iklim investasi, iklim. iklim usaha dan kemudahan investasi. c. Potensi SDA yang memadai d. Adanya kerjasama dengan Negara lain dalam bidang ekonomi, perdagangan dan investasi e. Kesadaran yang tinggi dari Masyarakat Jambi



3.3. Telaahan Renstra K/L

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun mendatang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang yaitu adanya peningkatan peran industri dan perdagangan disemua cabang. Untuk itu diharapkan adanya peningkatan dari peran Industri dan perdagangan mulai tahun 2009-2014. Dalam rangka peningkatan peran tersebut maka Sasaran khusus yang hendak dicapai dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut :

1. Sektor Industri
 - a. Meningkatnya jumlah industri yang pulih dan kuat
 - b. Bertambahnya investasi di industri-industri yang memperkerjakan banyak tenaga kerja
 - c. Meningkatnya investasi dan kegiatan pengolahan SDA di daerah sehingga produk SDA tidak dijual dalam kondisi bahan mentah
 - d. Meningkatnya penguasaan pasar luar negeri
 - e. Meningkatnya peran industri kecil dan menengah terhadap PDRB
2. Sektor Perdagangan
 - a. Pertumbuhan ekspor non migas
 - b. Diversifikasi pasar ekspor dan produk
 - c. Penyederhanaan perizinan luar negeri dan dalam negeri
 - d. Pertumbuhan sektor PDRB sektor perdagangan

Bila dikaitkan dengan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan tersebut diatas, maka beberapa permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh SKPD (Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi) dalam penerapannya terkait dengan tugas pokok dan fungsi antara lain :

1. Tingkat produktifitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi belum maksimal.
2. Sarana dan fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industri dan perdagangan belum memadai,

Sedangkan faktor-faktor penghambat ataupun pendorong dari pelayanan SKPD (Dinas Perindag Provinsi Jambi) ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

- a. Industri dasar yang menjadi pemasok bahan baku kemampuannya masih terbatas.
- b. Penerapan standar produk komponen dan bahan baku yang tersedia di pasar dalam negeri tidak atau belum memenuhi standar yang telah ditetapkan.
- c. Belum kuatnya peranan Industri kecil dan menengah.
- d. Ketergantungan ekspor pada beberapa komoditi dan beberapa Negara tujuan

2. Faktor Pendorong

- a. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat potensial untuk menumbuhkan kembangkan industri dan perdagangan berbasis sumber daya alam.
- b. Jumlah SDM Sektor industri dan perdagangan relative besar.
- c. Investasi mendorong impor teknologi.
- d. Adanya komitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan iklim usaha.

Untuk lebih detailnya keterkaitan antara Faktor Penghambat dan Pendorong serta permasalahan pelayanan SKPD dengan sasaran Renstra Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan dapat dilihat pada tabel 3.3 dibawah ini :

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan SKPD Berdasarkan Sasaran Renstra K/L
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong

No.	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.	Meningkatnya investasi & industri yang memperkokoh banyak tenaga kerja Meningkatnya jumlah industry yang pulih dan kuat Meningkatnya penguasaan pasar luar negeri Meningkatkan peran industri kecil dan menengah terhadap PDRB Peningkatan ekspor non migas Diversifikasi pasar ekspor dan impor Penyederhanaan perizinan luar negeri dan Dalam negeri Peningkatan PDRB sektor perdagangan	a. Tingkat produktifitas dan kesadaran PNS dalam mengemban tugas, berkreasi dan berinovasi rata-rata belum maksimal. b. Sarana dan fasilitas penunjang operasional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat industry dan perdagangan belum memadai	a. Industri dasar yg menjadi pemasok bahan baku kemampuannya masih terbatas. b. Penerapan standar produk , komponen dan bahan baku yang tersedia di pasaran dalam negeri tidak Atau belum memenuhi standar yg telah ditetapkan. c. Belum kuatnya peran IKM d. Ketergantungan ekspor pada beberapa Negara dan tujuan	a. Peran SDA Indonesia sangat potensial b. untuk menumbuh kembangkan Indag berbasis sumber daya alam c. Jumlah SDM Sektor Indag masih terbatas d. Investasi mendorong Impor teknologi e. Adanya komitmen dan konsisten untuk terus melakukan perbaikan Iklim usaha .

3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari berbagai permasalahan tersebut diatas, melahirkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2010-2015 yang terbagi menjadi isu nasional dan isu global dengan perincian sebagai berikut :

Isu Nasional

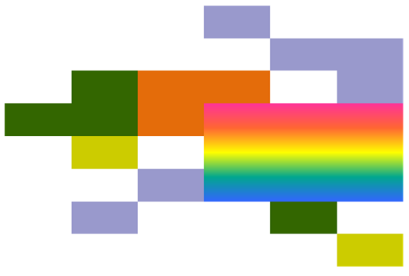
1. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
2. Perluasan Pasar Domestik
3. Perbaikan Infrastruktur
4. Peningkatan kemampuan Teknologi
5. Pemerataan Kemampuan Industri
6. Pemastian industri berwawasan lingkungan
7. Penciptaan Lapangan Kerja

Isu Global

1. Perluasan Pasar Non Tradisional
2. Diversifikasi Produk Ekspor
3. Perubahan Iklim

Terkait dengan pembangunan daerah secara terencana, diharapkan mampu mewujudkan Visi Pembangunan Provinsi Jambi yaitu **“Ekonomi Maju, Adil dan Sejahtera “ Jambi Emas 2015**, dengan pengertian mampu mewujudkan ekonomi yang berkualitas dibarengi dengan laju inflansi yang terkendali, berkurangnya angka pengangguran dan kemiskinan serta tetap terjaganya kelestarian alam dan lingkungan hidup dalam suasana aman, adil dan sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan sasaran jangka menengah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2011 tentang RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi akan melaksanakan langkah-langkah dan kegiatan-kegiatan serta berkoordinasi dengan berbagai lembaga/instansi terkait guna menjawab semua isu-isu strategis yang saat ini menjadi perhatian dari semua stake holder bidang industri dan perdagangan.



BAB IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

4.1. Visi dan Misi

4.1.1. Visi

Besarnya tantangan sebagai konsekuensi dari adanya era reformasi dan peningkatan persaingan di era globalisasi serta tuntutan masyarakat akan pelayanan prima, ditambah kurangnya sumberdaya manusia yang memenuhi persyaratan kualitas, mendorong Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi mempersiapkan diri dan berupaya menangkap peluang-peluang baru.

Untuk tetap eksis dan unggul dalam suatu tahapan yang konsisten, konsekuen dan berkelanjutan, maka Disperindag harus meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaat yang dituangkan dalam “Visi”.

Visi adalah suatu gambaran dan harapan yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi, atau pandangan jauh ke depan, ke mana dan bagaimana suatu organisasi akan di bawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pengertian tersebut, maka visi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang ingin dicapai yakni :

**Industrialisasi, Perdagangan sebagai
Motor Penggerak Ekonomi
(Primover) menuju Jambi Emas
2010-2015**

4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh organisasi agar tujuannya dapat terlaksana dan berhasil dengan optimal serta sesuai dengan visi yang diinginkan. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh aparatur Disperindag Provinsi Jambi dan pihak-pihak yang berkepentingan (*costumer dan*

stakeholders) dapat mengenali tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat mengetahui peran dan program-programnya serta hasil dan manfaat yang akan diperoleh di waktu-waktu mendatang.

Guna mewujudkan Visi tersebut diatas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menetapkan 4 Misi yang diemban sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja usaha industri yang bertumpuh pada keunggulan daerah.
2. Meningkatnya kinerja usaha perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya kinerja ekspor non migas
4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Pembangunan industri dan perdagangan merupakan bagian dari pembangunan nasional, oleh sebab itu pembangunan sektor industri dan perdagangan harus diarahkan untuk menjadi industri dan perdagangan yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi pembangunan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia. Pembangunan sektor industri dan perdagangan tidak hanya ditujukan untuk mengatasi permasalahan dan kelemahan di sector industri dan perdagangan yang disebabkan oleh melemahnya daya saing dan krisis global yang melanda dunia saat ini saja, melainkan juga harus mampu turut mengatasi permasalahan nasional dan daerah serta meletakkan dasar-dasar pembangunan industri dan perdagangan andalan masa depan.

Secara kuantitatif, peran industri dan perdagangan ini harus harus tampak pada kontribusi dalam bentuk Produk Domestik Bruto (PDRB), baik kontribusi secara menyeluruh maupun setiap cabang industri dan perdagangan. Dengan memperhatikan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagaimana yang telah ditetapkan diatas, maka Visi dan Misi tersebut perlu dirumuskan kedalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan yang hendak dicapai dalam perencanaan strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi periode 2010-2015 yaitu :

1. Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi.
2. Peningkatan usaha perdagangan dalam negeri di Provinsi Jambi.
3. Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatkan kapasitas pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan luar negeri
4. Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi serta kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

4.2.2. Sasaran

Kondisi sektor industri dan perdagangan pada lima tahun yang akan datang tidak bisa dilepaskan dari keadaan perekonomian dalam negeri saat ini dan proyeksinya untuk lima tahun mendatang. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ada keinginan kuat untuk lebih meningkat peran industri terutama industri kecil dan menengah di semua cabang industri serta peran perdagangan. Untuk itu diharapkan terjadinya peningkatan peran industri dan perdagangan mulai tahun 2010 sampai tahun 2015.

Untuk mewujudkan pencapaian tujuan diatas, maka perlu dirumuskan sasaran-sasaran yang sifatnya kuantitatif sehingga mudah untuk diukur keberhasilan pencapaiannya. Adapun sasaran pembangunan sektor industri dan perdagangan yang ingin diwujudkan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi 2010-2015 sebanyak 4 sasaran yaitu :

Sasaran 1 : Tumbuh dan berkembangnya usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar, dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Unit Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar ;
2. Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar ;
3. Jumlah Nilai Investasi yang Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar ;
4. Jumlah Nilai Produksi di Industri Kecil, Menengah dan Besar.

Sasaran 2 : Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri, dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Unit Usaha Perdagangan ;
2. Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro ;
3. Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet.

Sasaran 3 : Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah, dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Nilai Ekspor Non Migas ;
2. Jumlah Neraca Perdagangan Daerah Jambi.

Sasaran 4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB serta terciptanya kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat, dengan Indikator Kinerja :

1. Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor ;
2. Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk ;
3. Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Kemetrolagian Provinsi Jambi ;
4. Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrolagian Legal.

Peningkatan peran di sektor industri maupun perdagangan sebagaimana yang ingin dicapai melalui sasaran tersebut diatas sangat didukung oleh sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan dan struktur organisasi yang kuat untuk lima tahun kedepan. Secara kuantitatif perkiraan pertumbuhan di sektor industri dan perdagangan Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1. Perkiraan Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan Tahun 2010-2015

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Pada Tahun ke -					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Tumbuh dan berkembangnya usaha industri	- Jumlah Unit Usaha Industri Kecil, Menengah dan Besar (Unit)	24.500	25.250	26.160	26.468	26.840	27.282
	- Jumlah Tenaga Kerja Industri Kecil, Menengah dan Besar (orang)	80.155	83.708	87.949	92.846	97.488	102.362
	- Jumlah Nilai Investasi yang Tertanam di Industri Kecil, Menengah dan besar (Rp. Triliun)	6,43	7,19	7,5	7,86	8,25	8.71
	- Jumlah Nilai Produksi Industri, Menengah Kecil dan besar (Rp. Triliun)	3.020	3.019	3.485	3.654	3.841	4.033
Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri	- Jumlah Unit Usaha Perdagangan (unit)	25.550	30.550	35.098	38.607	42.467	46.713
	- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro (juta)	13.500	14.000	14.450	14.995	15.494	16.043
	- Jumlah Aktivitas Perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet (juta)	78.895	89.678	99.803	109.783	120.761	231.837
Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan	- Jumlah Nilai Ekspor Non Migas (US \$ Juta)	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800	2.000
	- Jumlah Neraca Perdagangan Daerah Jambi (Rp. Milyard)	7.000	8.100	9.652	11.438	13.491	15.852



1	2	3	4	5	6	7	8
Terwujudnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB serta terciptanya kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat	- Jumlah Jasa Pelayanan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor (sampel)	2.865	3.450	3.750	4.050	4.350	4.500
	- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk (Rp. Juta)	160	170	180	190	200	210
	- Jumlah Jasa Pelayanan Tera Alat UTTP Kemetrolagian Provinsi Jambi (Unit)	10.000	10.000	10.000	12.500	15.000	17.500
	- Jumlah Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrolagian Legal (Rp. Juta)	102,5	121,0	133,1	146,4	161,0	171,1



Dari tabel diatas, terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan industri selama tahun 2010-2015 diharapkan terus meningkat antara lain : perkembangan unit usaha industri kecil, menengah dan besar selama tahun 2010-2015 sebanyak 162.000 unit usaha atau rata-rata 27.000 unit pertahun, penyerapan tenaga kerja selama tahun 2010-2015 sebanyak 428.705 orang atau rata-rata 71.459 orang pertahun, investasi yang dibutuhkan selama tahun 2010-2015 sebesar 46,13 Triliun rata-rata 7,68 Triliun pertahun dan perkembangan nilai produksi selama tahun 2010-2015 sebesar 21,35 Triliun atau rata-rata 3,6 Triliun pertahun, perkembangan produk hasil industri wajib SNI yang diawasi selama tahun 2010-2015 sebanyak 78 buah atau rata-rata 13 pertahun.

Untuk Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi produk dalam negeri/lokal selama tahun 2010-2015 diharapkan juga terus meningkat diantaranya, pertumbuhan unit usaha perdagangan selama tahun 2010-2015 sebanyak 218.985 unit usaha atau rata-rata 36.497 unit pertahun, perkembangan Aktivitas Per-dagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro selama tahun 2010-2015 sebesar Rp. 28.482 juta unit usaha atau rata-rata Rp. 4.747 juta pertahun, perkembangan Aktivitas Per-dagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Karet selama tahun 2010-2015 sebesar Rp. 730.757 juta atau rata-rata Rp. 121.792 juta pertahun.

Peningkatan nilai ekspor non migas dan meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan (pedagang, eksportir dan importir) serta industri selama tahun 2010-2015 diharapkan terus meningkat diantaranya, perkembangan Nilai Ekspor Non Migas selama tahun 2010-2015 sebesar 9.000 U\$ S atau rata-rata 1.500 U\$ S pertahun, perkembangan Surplus Neraca Perdagangan Daerah Jambi selama tahun 2010-2015 sebesar Rp. 65.533 M atau rata-rata 10.922 M pertahun.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB serta terciptanya kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat selama tahun 2010-2015 diharapkan terus meningkat diantaranya, perkembangan Kegiatan Pengujian Mutu Komoditi Ekspor selama tahun 2010-2015 sebanyak 22.965 sampel atau rata-rata 3.827 sampel pertahun, perkembangan Penerimaan PAD Retribusi Pengujian Mutu Sampel Produk selama tahun 2010-2015 sebesar Rp. 1.110 juta atau rata-rata Rp. 185 juta pertahun, perkembangan



Kegiatan UTTP Pelayanan Kemetrologian Provinsi Jambi selama tahun 2010-2015 sebanyak 75.000 unit atau rata-rata 12.500 sampel pertahun, perkembangan Penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrologian Legal selama tahun 2010-2015 sebesar Rp. 835,1 juta atau rata-rata Rp. 139,2 juta pertahun.

Secara garis besar keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi Disperindag Provinsi Jambi “Industrialisasi, Perdagangan Sebagai Motor Penggerak Ekonomi (Primover) Menuju Jambi Emas 2010-2015		
Misi	Tujuan	Sasaran
Misi Disperindag Provinsi Jambi		
1. Meningkatnya kinerja usaha industri yang bertumpuh pada komoditi unggulan daerah	1. Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi	1. Tumbuh dan berkembangnya usaha industri kecil, menengah dan besar.
2. Meningkatnya kinerja usaha perdagangan dalam negeri	2. Peningkatan usaha perdagangan dalam negeridi Provinsi Jambi	2. Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri
3. Meningkatnya kinerja ekspor non migas	4. Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatan kapasitas pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan luar negeri	3. Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah
5. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	4. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	4. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa Pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB serta terciptanya kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat

4.3. Strategi dan Arah Kebijakan

4.3.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi tersebut, maka kiranya perlu disusun strategi yang didalamnya memuat upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan

dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Strategi sebagai rencana menyeluruh dan terpadu dari kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dalam mencapai tujuannya yaitu :

1. Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah daerah/pusat.
2. Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.
3. Peningkatan daya saing daerah dalam kompetisi perdagangan bebas.
4. Meminimalisasi tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam persaingan pasar Global.

4.3.2. Arah Kebijakan

Sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan yang dilakukan dalam melanjutkan Pembangunan sektor industri dan perdagangan di Provinsi Jambi, yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar berbasis kompetensi daerah
2. Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan
3. Pertumbuhan kawasan industri Wilayah Timur Provinsi Jambi.
4. Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar ekspor.
5. Mendukung pelaksanaan stabilitasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat.
6. Mendorong Peningkatan PAD Provinsi Jambi.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, serta Tujuan dan Sasaran jangka Menengah Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan 4.4.

Tabel 4.3.
Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi
Tahun 2010-2015

Visi Disperindag Provinsi Jambi			
“Industrilisasi, Perdagangan Sebagai Motor Penggerak Ekonomi (Primover) Menuju Jambi Emas 2010-2015			
Misi 1 : Meningkatnya kinerja usaha industri yang bertumpuh pada komoditi unggulan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi	Tumbuh dan berkembangnya usaha industri kecil, menengah dan besar.	Peningkatan daya saing daerah dalam kompetisi perdagangan bebas.	Mendorong pertumbuhan industri hilir kelapa sawit dan karet berbasis kompetensi daerah
			Pengembangan sentra-sentra produksi industri kecil di pedesaan
			Pertumbuhan kawasan industri wilayah timur Provinsi Jambi
Misi 2 : Meningkatnya kinerja usaha perdagangan dalam negeri			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan usaha perdagangan dalam negeri di Provinsi Jambi	Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri	Mengintensifkan pengawasan dan penertiban terhadap peredaran produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan.	Mendukung pelaksanaan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat
Misi 3 : Meningkatnya kinerja ekspor non migas dan meningkatnya pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatan kapasitas pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan luar negeri	Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah	Mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pelayanan kepada pelaku usaha bekerjasama dengan instansi terkait dan dukungan dari Pemerintah daerah/pusat.	Mendorong pengembangan usaha perdagangan yang efisien, berdaya saing dan berorientasi pasar ekspor.
Misi 4 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mendorong kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi dan kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Jasa Pelayanan UPTD Metrologi dan UPTD BPSMB serta terciptanya kelancaran distribusi dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masvarakat	Meminimalisasi tingkat kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam persaingan pasar Global.	Mendukung pelaksanaan stabilisasi harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok masyarakat
			Mendorong peningkatan PAD Provinsi Jambi









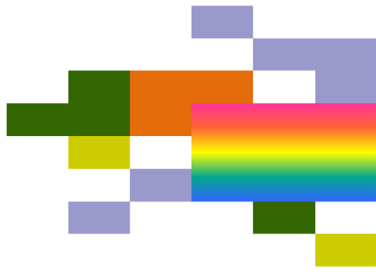












BAB V

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Program merupakan rangkaian kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau pun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mengatasi/meminimalisir tantangan-tantangan pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan, maka program-program pokok/prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2010 - 2015 adalah sebagai berikut :

5.1. Rencana Program, Kegiatan dan indikator Kinerja

5.1.1. Rencana Program dan Kegiatan Pokok

Program 1 : Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan meningkatkan tertib tata niaga, tertib ukur dan kepastian berusaha dalam rangka perlindungan konsumen dan pengawasan barang dan jasa yang beredar di pasaran. Sasaran program yaitu Terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan / hak konsumen dan sedangkan Indikator Sasaran yaitu Peningkatan Pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Metrologi Legal kepada Pedagang dan masyarakat.

Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pertama : Jumlah jasa pelayanan Tera alat UTTP Kemetrolgian Provinsi Jambi (unit).

Indikator Kinerja Kedua : Jumlah penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrolgian Legal (Rp.juta)

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

- a. Tujuan : Terwujudnya perlindungan terhadap kepentingan/hak masyarakat selaku konsumen
- b. Sasaran : Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa di masyarakat
- c. Indikator sasaran : Terselenggaranya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa di masyarakat
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Pengawasan Pengawasan Peredaran Barang Makanan dan Minuman, Obat-obatan dan barang strategis (bahan bangunan, elektronika, ban kendaraan, alat listrik, regulator kompor gas dll)
 - d.2. Pengawasan Distribusi barang yang diatur tataniaganya (Pupuk, Minuman beralkohol, bahan berbahaya)
 - d.3. Pengawasan Garam Beryodium

2. Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD Kemetrolgian.

- a. Tujuan : Peningkatan pelayanan jasa tera/tera ulang di lab. UPTD Metrologi
- b. Sasaran : Meningkatnya kompetensi pelayanan lab. Kemetrolgian
- c. Indikator sasaran : Peralatan standar laboratorium kemetrolgian
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Kompetensi Sistem Managemen Mutu dan laboratorium Kemetrolgian

3. Dukungan dan Fasilitas Pasar Murah.

- a. Tujuan : Membantu kebutuhan pokok masyarakat
- b. Sasaran : Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat
- c. Indikator sasaran : Masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terselenggaranya pasar murah bahan pokok

4. Kalibrasi dan Verifikasi peralatan Standar Labor Kemetrolgian.

- a. Tujuan : Bertambahnya ruang lingkup pelayanan kalibrasi dan verifikasi standar
- b. Sasaran : Peningkatan pelayanan kalibrasi dan verifikasi peralatan standar laboratorium
- c. Indikator sasaran : Peralatan standar laboratorium kemetrolgian
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya kegiatan Kalibrasi dan verikasi peralatan Standar Labor Kemetrolgian.

5. Tera/Tera Ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Labor. Kemetrolgian.

- a. Tujuan : Meningkatnya pelayanan tera/tera ulang alat UTTP
- b. Sasaran : Meningkatnya jumlah UTTP yang ditera / tera ulang



- c. Indikator sasaran : Peralatan Ukur, Takaran, Timbangan dan Perlengkapannya
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya kegiatan Tera/Tera Ulang alat UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Labor. Kemetrolagian.

6. Pengawasan UTTP dan BDKT

- a. Tujuan : Berkurangnya pelanggaran terhadap penggunaan alat UTTP dan BDKT
- b. Sasaran : Terlindungnya produsen dan konsumen dalam transaksi serah terima barang yang berdasarkan ukuran, takaran dan timbangan
- c. Indikator sasaran : Peralatan UTTP dan BDKT yang akan diawasi atau dikontrol
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Pengawasan UTTP dan BDKT di 11 Kab/Kota dalam Provinsi Jambi

7. Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

- a. Tujuan : Memberikan pemahaman kepada peserta sosialisasi tentang kebijakan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen
- b. Sasaran : Meningkatkan pengetahuan peserta sosialisasi tentang beberapa kebijakan yang berkaitan dengan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen
- c. Indikator sasaran : Peserta mengetahui dan paham tentang kebijakan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen

Program 2 : Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar

Program ini bertujuan untuk pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan kinerja yang efisien dan kompetitif serta memiliki ketergantungan rendah terhadap bahan baku impor. Sasaran program yaitu meningkatnya unit usaha baru, meningkatnya produk IKM dan meluasnya diversifikasi jenis produk serta Indikator Sasaran yaitu Pembinaan unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi dan sentra industri kecil.

Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------------|--|
| Indikator Kinerja Pertama | : Jumlah unit usaha industri kecil, menengah dan besar (unit) |
| Indikator Kinerja Kedua | : Jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah dan besar (orang) |

Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar (IKMB) akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



1. Pengembangan dan Peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah (IKM)

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan SDM IKM
- b. Sasaran : Peningkatan volume usaha, pendapatan dan tumbuhnya usaha baru
- c. Indikator sasaran : Meningkatnya ketrampilan para aparat dan pengrajin IKM
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Bintel untuk peningkatan SDM IKM

2. Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan IK dalam pengolahan Aneka Makanan
- b. Sasaran : Peningkatan mutu makanan dan pendapatan
- c. Indikator sasaran : Meningkatnya ketrampilan para pengrajin dalam pengolahan makanan
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi

3. Pelatihan Kewirausahaan CEFE

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan pengrajin IKM
- b. Sasaran : Peningkatan volume usaha, pendapatan dan tumbuhnya usaha baru
- c. Indikator sasaran : Meningkatnya ketrampilan para pengrajin IKM
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan CEFE

4. Pelatihan Desain Anyaman Bambu

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan pengrajin IKM
- b. Sasaran : Peningkatan volume usaha, pendapatan dan tumbuhnya usaha baru
- c. Indikator sasaran : Meningkatnya pengetahuan/ketrampilan para pengrajin IKM
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Desain Anyaman Bambu

5. Sosialisasi Standarisasi dan Mutu Bata Genteng

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan/ketrampilan pengrajin bata genteng
- b. Sasaran : Peningkatan volume usaha dan pendapatan
- c. Indikator sasaran : meningkatnya pengetahuan/ketrampilan para pengrajin bata genteng
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)



d.1. Terlaksananya Sosialisasi Standarisasi dan Mutu Bata Genteng

6. Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi

- a. Tujuan : Mempromosikan produk IKM melalui partisipasi pameran tingkat regional dan lokal
- b. Sasaran : Perluasan pasar produk IKM
- c. Indikator sasaran : Produk IKM Jambi dapat bersaing dengan produk dari luar Provinsi Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terselenggaranya Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi

7. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bordir KUB Bordir Kasang

- a. Tujuan : Meningkatkan mutu produk yang dihasilkan oleh pengrajin IKM border KUB
- b. Sasaran : Peningkatan mutu produk, volume usaha dan pendapatan
- c. Indikator Sasaran :
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bordir KUB Bordir Kasang

8. Sosialisasi Penggunaan Barang Tambahan Makanan untuk IK Pangan

- a. Tujuan : Peserta sosialisasi mengetahui Penggunaan Barang Tambahan Makanan untuk IK Pangan
- b. Sasaran : Meningkatkan pengetahuan tentang Penggunaan Barang Tambahan Makanan untuk IK Pangan
- c. Indikator Sasaran : Penggunaan Barang Tambahan Makanan untuk IK Pangan secara tepat guna
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Tersosialisasinya Penggunaan Barang Tambahan Makanan untuk IK Pangan

9. Pelatihan Motivator KUB Industri Kecil

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan para motivator KUB Industri kecil
- b. Sasaran : Terlatihnya para motivator dalam membantu peningkatan KUB Industril kecil
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya pengetahuan aparat bidang KUB industry kecil
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya pelatihan motivatot KUB Industri kecil

10. Pelatihan Pengembangan Desain Pakaian Batik dan Produk Konveksi bagi IK sandang/batik

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan para IK sandang/batik
- b. Sasaran : Peserta dapat mengembangkan desain batik tulis dan Konveksi
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya kapasitas industry produksi dan pendapatan pengrajin IK sandang
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pengembangan Desain Pakaian Batik dan Produk Konveksi bagi IK sandang/batik

11. Penguatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil

- a. Tujuan : Perkuatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil
- b. Sasaran : Peningkatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil
- c. Indikator Sasaran : Teratasinya masalah kebutuhan peralatan pada IKM
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Bimbingan usaha kelompok industri kecil
 - d.2. fasilitasi dan akses permodalan usaha industri kecil

12. Sosialisasi sertifikasi Produk Halal Bagi IK Makanan

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan pengrajin tentang sertifikasi produk halal IK makanan
- b. Sasaran : Peningkatan mutu produk halal yang tersertifikasi
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya pengetahuan pengrajin tentang sertifikasi produk halal IK makanan
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Sosialisasi sertifikasi Produk Halal Bagi IK Makanan

13. Pelatihan Pengolahan Angka Makanan di Desa Mandiri Pangan

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan IK dalam pengolahan Angka Makanan di Desa Mandiri Pangan
- b. Sasaran : Peningkatan mutu makanan dan pendapatan
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya diversifikasi makanan warga Desa Mandiri Pangan
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Angka Makanan di Desa Mandiri Pangan

14. Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kegiatan Rumah Tenun di Jambi

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi pengrajin tenun songket
- b. Sasaran : Meningkatnya jumlah pengrajin songket



- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya produksi dan pemasaran produk kriya Provinsi Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Fasilitas dan Dukungan Pengembangan Kegiatan Rumah Tenun di Jambi

15. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Industri Bata Genteng dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan pengrajin bata genteng dalam peningkatan mutu produk dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
- b. Sasaran : Peningkatan mutu produk yang ramah lingkungan
- c. Indikator Sasaran : Pengenalan produk industri genteng
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Industri Bata Genteng dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan

16. Visualisasi Pengembangan dan Pemasyarakatan IK Melalui media elektronik

- a. Tujuan : Produk IKM Provinsi Jambi dikenal secara luas melalui media elektronik
- b. Sasaran : Produk unggulan IKM Provinsi Jambi
- c. Indikator Sasaran : Dikenalnya Produk IKM Provinsi Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Visualisasi Pengembangan dan Pemasyarakatan IK Melalui media elektronik

17. Pelatihan Calon Fasilitator GKM Industri Kecil Bagi Aparat Pembina Kab/Kota se Prov. Jambi

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan calon fasilitator GKM Industri Kecil Bagi Aparat Pembina Kab/Kota se Prov. Jambi
- b. Sasaran : Terlatihnya Calon Fasilitator GKM Industri Kecil
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya kinerja para Calon Fasilitator GKM Industri Kecil
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Calon Fasilitator GKM Industri Kecil Bagi Aparat Pembina Kab/Kota se Prov. Jambi

18. Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB

- a. Tujuan : Mengevaluasi dan memonitoring perkembangan IKM dan KUB
- b. Sasaran : Evaluasi hasil pembinaan yang telah dilakukan kepada IKM
- c. Indikator Sasaran : Terselenggaranya Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)

- d.1. Evaluasi dan monitoring kegiatan program
- d.1. Evaluasi dan monitoring produk unggulan daerah

19. Bimteks Produksi Makanan Olahan Unggulan Daerah

- a. Tujuan : Meningkatkan daya saing produk makan olahan unggulan daerah
- b. Sasaran : Terwujudnya perajin Industri Kecil Makanan Unggulan daerah yang mampu bersaing di pasar dan dapat memenuhi selera konsumen
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya jumlah pengusaha IK Produk Unggulan
- d. Indikator Kinerja Output :
 - d.1. Terlaksananya Bimtek Produksi Makanan Olahan Unggulan Daerah

20. Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di Desa Mandiri Terpadu

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan dan wawasan warga Kota Mandiri Pangan
- b. Sasaran : Terlatihnya warga dalam rangka pengembangan produk unggulan
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya mutu produk unggulan dan menambah penghasilan warga
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terselenggaranya Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di Desa Mandiri Terpadu

21. Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan sparepack kendaraan roda 2 dari karet

- a. Tujuan : Meningkatnya pengetahuan pengrajin industri barang dari lateks
- b. Sasaran : Pengembangan industri daerah
- c. Indikator Sasaran : Terlaksananya Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan sparepart kendaraan roda 2 dari karet.
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan pembuatan spare part kendaraan roda 2 dari karet
 - d.2. Terlaksananya pemberian bantuan mesin peralatan pembuatan sparepack kendaraan roda 2 dari karet

22. Pengawasan teknis pengembangan AMDK dan Kompon

- a. Tujuan : Peningkatan terhadap penerapan SNI dan teknis produksi AMDK dan Kompon sehingga produksi yang dihasilkan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- b. Sasaran : Produk Air Minum Dalam Kemasan dan produk kompon
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya kualitas AMDK dan produk kompon



- d. Indikator Kinerja Output :
 - d.1. Terlaksananya Pemantauan proses teknis produksi AMDK akan Kompon

23. Seminar bedah batik

- a. Tujuan : Pengenalan berbagai motif batik Jambi kepada para produsen dan konsumen
- b. Sasaran : Peningkatan mutu batik Jambi
- c. Indikator Sasaran : Masukan bagi perkembangan desaian batik jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya seminar motif batik

24. Fasilitas Pengembangan Pengrajin/IKM se Provinsi Jambi

- a. Tujuan : Membina insan perajin dalam pengembangan aneka ragam Kriya khas Jambi
- b. Sasaran : Peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan perajin dalam pengelolaan Usaha.
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya pendapatan IKM
- d. Indikator Kinerja Output :
 - d.1. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pengrajin/IKM se Provinsi Jambi

25. Gelar Pameran/Bazar Perkemahan Pramuka Putri Nasional se Indonesia di Provinsi Jambi

- a. Tujuan : Memberikan informasi peserta Kemah Pramuka Putri Nasional dari seluruh wilayah Indonesia dan pengunjung pameran tentang produk-produk IKM berbasis kearifan local yang dimiliki Provinsi Jambi.
- b. Sasaran : Peningkatan mutu hasil perajin IKM Provinsi Jambi
- c. Indikator Sasaran : Memberikan peluang pasar kepada perajin IKM Provinsi Jambi agar dapat berkarya yang pada gilirannya dapat meningkatkan penghasilan.
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pameran Kemah Pramuka Putri Nasional se Indonesia di Provinsi Jambi

26. Pelatihan Pembuatan Cendramata

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan perajin tentang peningkatan mutu hasil produksinya
- b. Sasaran : Peningkatan pendapatan perajin IKM Provinsi Jambi
- c. Indikator Sasaran : Memberikan peluang pasar kepada perajin IKM Provinsi Jambi untuk bersaing dalam hal mutu produk



- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output)
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Cendrama

27. Pelatihan Pengembangan Desain Batik Tulis, Pewarna batik dan Pembuatan Canting Batik

- a. Tujuan : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perajin IK Batik.
- b. Sasaran : Peningkatan volume usaha, pendapatan dan tumbuhnya usaha baru
- c. Indikator Sasaran : Peningkatan kewirausahaan pengrajin IKM
- d. Indikator Kinerja Output :
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Pengembangan Desain Batik Tulis, Pewarna batik dan Pembuatan Canting Batik

28. Pelatihan Kerajinan Kayu

- a. Tujuan : Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan perajin IK kayu
- b. Sasaran : Peningkatan volume usaha, pendapatan dan tumbuhnya usaha baru
- c. Indikator Sasaran : Peningkatan kewirausahaan pengrajin IKM
- d. Indikator Kinerja Output :
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Kayu

Program 3 : Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Program ini bertujuan meningkatkan ekspor non migas Provinsi Jambi baik volume maupun nilai ekspor, sehingga apabila nilai ekspor Jambi meningkat akan meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus juga membuka lapangan pekerjaan disamping mendatangkan devisa bagi negara. Sasaran program yaitu terwujudnya ekspor non migas serta Indikator sasaran yaitu Peningkatan volume nilai ekspor.

Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pertama : Jumlah nilai ekspor non migas (US \$)

Indikator Kinerja Kedua : Jumlah neraca perdagangan daerah (Rp. Milyard)

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelatihan Teknik Akses dan Survey Pasar melalui Internet

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan pelaku usaha tentang akses pasar ekspor
- b. Sasaran : Eksportir dan aparat
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya dan mengembangkannya produk ekspor
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :



d.1. Terlaksananya Pelatihan Teknik Akses dan Survey Pasar melalui Internet

2. Pameran Luar Negeri

- a. Tujuan : Mempromisikan produk ekspor melalui partisipasi pameran luar negeri
- b. Sasaran : Perluasan pasar produk ekspor
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya dan mengembangkannya produk ekspor
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya pameran luar negeri

3. Diklat Teknis Prosedur Ekspor

- a. Tujuan : Meningkatnya pengetahuan eksportir dan importir
- b. Sasaran : Ekportir, importer dan aparat
- c. Indikator Sasaran : Terbinanya para eksportir dan importer dalam meningkatkan dunia usahanya
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Diklat Teknis Prosedur Ekspor

4. Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah

- a. Tujuan :Meningkatnya ekspor non migas
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja ekspor
- c. Indikator Sasaran : Pengembangan pasar produk ekspor
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah

5. Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri

- a. Tujuan : Peningkatan kemampuan aparat Perdagangan Luar Negeri
- b. Sasaran : Terlatihnya aparat dibidang pengembangan Perdagangan Luar Negeri
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya dan mengembangkan produk ekspor impor
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Peningkatan SDM Luar Negeri

6. Forum Koordinasi Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

- a. Tujuan : Peningkatan kinerja ekspor
- b. Sasaran : Terjalinnya kerjasama para ekportir guna menunjang perdagangan luar negeri
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya dan mengembangkan produk ekspor
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Forum Koordinasi Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri



Program 4 : Program Penataan struktur Industri

Program ini bertujuan mendorong terciptanya struktur industri yang kuat antara industri hilir dan hulu. Sasaran program yaitu terciptanya perluasan kesempatan usaha dan terciptanya dukungan peningkatan unilitas kapasitas produksi termasuk pemberdayaan sumberdaya industri dan perdagangan dan Indikator Sasaran yaitu Pemetaan Industri Menengah dan Besar.

Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Pertama** : Jumlah nilai investasi yang tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)
- Indikator Kinerja Kedua** : Jumlah nilai produksi Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)

Program Penataan struktur industri ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri

- a. Tujuan : Meningkatkan pengetahuan pelaku industri tentang Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri
- b. Sasaran : Tercapainya Penerapan peraturan perizinan usaha industri
- c. Indikator Sasaran : Meningkatnya pengetahuan pelaku industri dalam peningkatanstruktur industri
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri

2. Identifikasi Potensi Bahan Baku pada industri Hilir Karet

- a. Tujuan : Penyediaan informasi data yang valid untuk komoditi karet
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja Industri Karet
- c. Indikator Sasaran : Dapat mendukung rencana pendirian pabrik kompon
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Identifikasi Potensi Bahan Baku pada industri Hilir Karet

3. Bimbingan Teknis dan Penerapan SNI Industri AMDK

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan aparat dan pengusaha AMDK tentang pentingnya penerapan SNI pada industri AMDK
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja Industri AMDK
- c. Indikator Sasaran : Pengembangan industri daerah
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Bimtek dan Penerapan SNI Industri AMDK



4. Sosialisasi Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks)

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan para pelaku industri tentang Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks)
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja para pelaku industri
- c. Indikator Sasaran : Termotivasinya pendirian usaha kompon bantal busa dan mainan anak-anak
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks)

5. Updating data IMB

- a. Tujuan : Tersusunnya buku data industri menengah dan besar
- b. Sasaran : Informasi bagi para pelaku usaha tentang perkembangan industri IMB di Provinsi Jambi
- c. Indikator Sasaran : Tersedianya data IMB Provinsi Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Updating data IMB

6. Pembuatan profil investasi barang dan karet

- a. Tujuan : Tersusunnya profil barang dari karet hasil produksi Provinsi Jambi
- b. Sasaran : Informasi bagi para pelaku usaha tentang perkembangan profil barang dari karet
- c. Indikator Sasaran : Tersedianya profil investasi barang dan karet
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Pembuatan profil investasi barang dan karet

7. Identifikasi industri perbengkelan otomotif

- a. Tujuan : Teridentifikasinya industri perbengkelan otomotif
- b. Sasaran : Informasi bagi para pelaku usaha tentang perkembangan industri perbengkelan otomotif
- c. Indikator Sasaran : Tersedianya data industri perbengkelan otomotif
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Identifikasi industri perbengkelan otomotif

8. Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan barang dari latek

- a. Tujuan : Peningkatan pengetahuan pengrajin industri barang dari lateks
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja pelaku industri dalam pembuatan barang dari latek
- c. Indikator Sasaran : Pengembangan industri daerah
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan barang dari latek



9. Pengembangan otomotif dan alat angkut (Magang Pembuatan sparepack kendaraan roda 2)

- a. Tujuan : Meningkatnya pengetahuan pengrajin industri sparepack kendaraan roda 2
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja peserta magang
- c. Indikator Sasaran : Pengembangan industri daerah
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Magang Pembuatan sparepack kendaraan roda 2

10. Mapping Industri Provinsi Jambi

- a. Tujuan : Sinkronisasi dan validasi data industri up to date
- b. Sasaran : Tersedianya informasi perkembangan industri di Provinsi Jambi
- c. Indikator Sasaran : Pengembangan industry daerah
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Mapping Industri Provinsi Jambi

Program 5 : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan yaitu untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas sistem distribusi barang dan jasa guna menjamin pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Sasaran program yaitu stabilitas harga, memperpendek tata niaga komoditi karet dan agro dan mengurangi biaya pemasaran dan Indikator Sasaran yaitu terselenggaranya pembinaan pasar lelang spot dan partisipasi pameran.

Keberhasilan program ini diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja sebagai berikut :

- Indikator Kinerja Pertama** : Jumlah perkembangan unit usaha perdagangan (unit)
- Indikator Kinerja Kedua** : Jumlah perkembangan aktivitas perdagangan melalui kegiatan Pasar Lelang Agro (juta)
- Indikator Kinerja Ketiga** : Jumlah perkembangan aktivitas perdagangan melalui Pasar Lelang Karet (juta)

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Daerah ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet

- a. Tujuan : Mewujudkan stabilitas harga karet
- b. Sasaran : Pembinaan pasar lelang karet dan pelaksanaan pasar lelang karet
- c. Indikator Sasaran : Harga transparan dan wajar , mutu karet dipasaran lelang semakin baik.
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet



2. Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal

- a. Tujuan : Meningkatkan usaha dagang kecil
- b. Sasaran : Memberikan fasilitasi kepada usaha dagang kecil
- c. Indikator Sasaran : Terfasilitasinya usaha dagang kecil informal
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terselenggaranya Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal

3. Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri/JBD/JBE

- a. Tujuan : Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap produk dalam negeri
- b. Sasaran : Perluasan pasar produk dalam negeri
- c. Indikator Sasaran : Partisipasi pameran Dalam Provinsi Jambi
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri/JBD/JBE

4. Inventarisasi dan Pendataan Sarana Perdagangan

- a. Tujuan : Menginventarisasi dan mendata sarana perdagangan di Provinsi Jambi
- b. Sasaran : sebagai informasi pelaku usaha tentang sarana perdagangan di Povinsi Jambi
- c. Indikator Sasaran : Tersedianya data sarana perdagangan di Provinsi Jambi
- d. Indikator Kinerja Output : terlaksananya inventarisasi dan pendataan sarana perdagangan

Program 6 : Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Program ini bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan Laboratorium pengujian mutu barang ekspor-impor. Hasil yang diharapkan komoditi ekspor sesuai dengan SNI, produk ekspor dapat bersaing dipasar internasional/Global dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sasaran program yaitu meningkatnya komoditas yang diuji dan penerimaan PAD dan Indikator Sasaran yaitu peningkatan mutu barang ekspor.

Keberhasilan program ini diukur melalui 2 (dua) Indikator Kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pertama : Jumlah perkembangan kegiatan pengujian mutu komoditi ekspor (sampel)

Indikator Kinerja Kedua : Jumlah perkembangan aktivitas penerimaam PAD retribusi pengujian mutu sampel produk (Rp. Juta)

Program Pengembangan Standarisasi Nasional ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :



1. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi

- a. Tujuan : Operasional kegiatan Laboratorium UPTD BPSMB
- b. Sasaran : Pengadaan bahan kimia untuk Laboratorium UPTD BPSMB
- c. Indikator Sasaran : Pembelian bahan kimia untuk Laboratorium UPTD BPSMB
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi

2. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran

- a. Tujuan : Mengurangi peredaran barang non ber SNI
- b. Sasaran : Pengawasan peredaran produk eksporimpor di pasaran
- c. Indikator Sasaran : Pengawasan SNI wajib di pasaran
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terselenggaranya Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran

3. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor

- a. Tujuan : Peningkatan pelayanan pengujian Laboratorium UPTD BPSMB
- b. Sasaran : Meningkatnya PAD hasil pelayanan pengujian Laboratorium UPTD BPSMB
- c. Indikator Sasaran : Penambahan ruang lingkup pengujian laboratorium UPTD BPSMB
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor

4. Sosialisasi laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi

- a. Tujuan : Peningkatan akreditasi dan kepercayaan pelanggan dan peningkatan PAD
- b. Sasaran : Penambahan ruang lingkup dan peningkatan SDM aparatur laboratorium
- c. Indikator Sasaran : Peningkatan mutu produk ekspor dan impor
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Sosialisasi laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi

5. Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium

- a. Tujuan : Peningkatan pelayanan pengujian mutu barang ekspor
- b. Sasaran : Pengadaan peralatan Lab. BPSMB
- c. Indikator Sasaran : Pembelian peralatan Lab. BPSMB
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terselenggaranya Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium

6. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSDMB

- a. Tujuan : Peningkatan kemampuan petugas kalibrasi BPSDMB
- b. Sasaran : Terlatihnya petugas BPSDMB dalam mengkalibrasi
- c. Indikator Sasaran : meningkatnya kinerja pelayanan kalibrasi
- d. Indikator Kinerja Output :
 - d.1. terlaksananya peningkatan SDM petugas kalibrasi BPSDMB

Program 7 : Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan IKM dalam penerapan teknologi industri. Sasaran program yaitu berkembangnya kemampuan industri dan penganeka ragam basis produksi serta penerapan teknologi yang tepat guna dan Indikator Sasaran yaitu meningkatnya teknologi industri tepat guna. Keberhasilan program ini diukur melalui 1 (satu) Indikator Kinerja sebagai berikut :

Indikator Kinerja Pertama : Jumlah perkembangan industri menengah dan besar

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri ini akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

- a. Tujuan : Peningkatan pelayanan informasi tentang perkembangan IKMB
- b. Sasaran : Informasi data / produk IKMB
- c. Indikator Sasaran : Tersedianya data dan informasi produk IKMB
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

2. Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir

- a. Tujuan : Peningkatan dalam penerapan Teknologi Industri Hilir
- b. Sasaran : Peningkatan kinerja stakeholder bidang industri
- c. Indikator Sasaran : Meningkatkan pengetahuan aparat dan dunia usaha dalam pengembangan industri hilir
- d. Indikator Kinerja Kegiatan (output) :
 - d.1. Terlaksananya pelatihan pengembangan industri hilir
 - d.2. Terlaksananya pemberian bantuan mesin industri

5.2. Kelompok sasaran dan Pendanaan Indikatif

Kelompok sasaran program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 sebagian besar berada di Wilayah Provinsi Jambi sedangkan Indikatif alokasi anggaran dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi sebesar Rp. 29.984 Milyard, dengan perincian sebagaimana pada tabel 5.1.

Tabel 5.1. Lokasi Pelaksanaan dan Indikatif Program Tahun 2010-2015 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi

NO.	PROGRAM	ALOKASI ANGGARAN (Juta)						TOTAL ALOKASI Rp. (Juta)	LOKASI PELAKSANAAN
		2010	2011	2012	2013	2014	2015		
1.	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	561	750	800	1.000	1.300	1.500	5.911	Provinsi Jambi
2.	Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar	1.286	1.434	2.109	2.273	2.550	3.000	12.652	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
3.	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	420	439	553	675	900	1.000	3.987	Dalam dan Luar Provinsi Jambi
4.	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	0	0	0	1.750	2.100	2.500	6.350	Provinsi Jambi
5.	Penaatan Struktur Industri	157	300	594	600	850	1.250	3.751	Provinsi Jambi
6.	Peningkatan efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	336	345	354	525	1.200	1.450	4.210	Provinsi Jambi
7.	Pengembangan Standarisasi Nasional	249	308	666	800	1.700	2.000	3.500	Provinsi Jambi
	Jumlah	3.009	3.576	5.013	7.623	10.600	12.700	42.521	

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 dapat dilihat pada tabel 5.2. dibawah ini :

















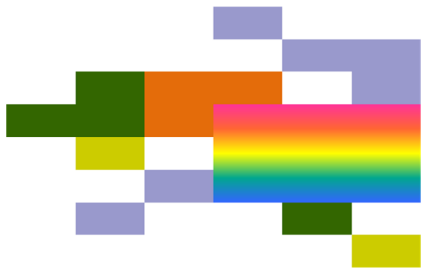












BAB VI

Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 - 2025, maka kedepan ada 5 (lima) tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan antara lain tujuan 3 yang berhubungan dengan sektor perindustrian dan perdagangan yaitu ***“Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi”***.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan, Provinsi Jambi menetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan sektor perindustrian dan perdagangan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan diantaranya dalam bentuk ***“Terwujudnya iklim investasi yang sehat dengan reformasi kelembagaan ekonomi di berbagai tingkatan pemerintahan yang mampu mengurangi praktik ekonomi tinggi”***.

Mengacu pada tujuan dan sasaran yang terdapat dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 tersebut, maka ditetapkanlah program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Kegiatan yang dilaksanakan :

- Penguatan Sistem dan Peningkatan Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
- Pengembangan Infrastruktur Lembaga Laboratorium UPTD Kementerian.
- Dukungan dan Fasilitas Pasar Murah.
- Kalibrasi dan verifikasi peralatan Standar Labor Kemetrologian.
- Tera Ulang UTTP (Ukur, Takar, Timbangan dan Kelengkapannya) Kemetrologian.
- Pengawasan UTTP dan BDKT
- Sosialisasi Kebijakan Kemetrologian dan Perlindungan Konsumen

Indikator Kinerja Program yaitu :

- Jumlah jasa pelayanan Tera alat UTTP Kemetrologian Provinsi Jambi (unit).
- Jumlah penerimaan PAD Retribusi Jasa Kemetrologian Legal (Rp.juta)

2. Program Pengembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar

Kegiatan yang dilaksanakan :

- a. Pengembangan dan Peningkatan SDM IKM
- b. Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi
- c. Pelatihan Kewirausahaan CEFE
- d. Pelatihan Desaian Anyaman Bambu
- e. Sosialisasi Standarisasi dan Mutu Bata Genteng
- f. Pameran dan Promosi IK Regional dan Lokal Provinsi Jambi
- g. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bordir KUB Bordir Kasang
- h. Sosialisasi Penggunaan Barang Tambahan Makanan untuk IK Pangan
- i. Pelatihan Motivator KUB Industri Kecil
- j. Pelatihan Pengembangan Desain Pakaian Batik dan Produk Konveksi bagi IK sandang/batik
- k. Penguatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil
- l. Sosialisasi sertifikasi Produk Halal Bagi IK Makanan
- m. Pelatihan Pengolahan Angka Makanan di Desa Mandiri Pangan
- n. Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Kegiatan Rumah Tenun di Jambi
- o. Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Industri Bata Genteng dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan
- p. Visualisasi Pengembangan dan Pemasyarakatan IK Melalui media elektronik
- q. Pelatihan Calon Fasilitator GKM Industri Kecil Bagi Aparat Pembinaan Kab/Kota se Prov. Jambi
- r. Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB
- s. Bimbingan Teknis Dalam Rangka Pengembangan Produk Unggulan di Kota Mandiri Terpadu
- t. Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan spare part kendaraan roda 2 dari karet
- u. Pengawasan Teknis Pengembangan AMDK dan Kompon
- v. Seminar bedah batik
- w. Fasilitasi Pengembangan Pengrajin IKM se Provinsi Jambi
- x. Gelar Pameran/Bazar Perkemahan Pramuka Putri se Indonesia di Provinsi Jambi
- y. Pelatihan Pembuatan Cendramata
- z. Pelatihan Pengembangan Desain Batik Tulis, Pewarna Batik dan Pembuatan Canting Batik
- â. Pelatihan Kerajinan Kayu

Indikator Kinerja Program :

- a. Jumlah unit usaha industri kecil, menengah dan besar (unit)
- b. Jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah dan besar (orang)



3. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pelatihan Teknik Akses dan Survei Pasar melalui Internet
- b. Pameran Luar Negeri
- c. Diklat Teknis Prosedur Ekspor
- d. Forum Koordinasi Peningkatan Kinerja Ekspor Daerah
- e. Peningkatan SDM Perdagangan Luar Negeri
- f. Forum Koordinasi Implementasi Kebijakan Perdagangan Luar Negeri

Indikator Kinerja Program yaitu :

- a. Nilai Ekspor Non Migas
- b. Surplus neraca perdagangan daerah

4. Program Penataan struktur Industri

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri
- b. Identifikasi Potensi Bahan Baku pada Industry Hilir Karet
- c. Bimbingan Teknis dan Penerapan SNI Industri AMDK
- d. Sosialisasi Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks)
- e. Updating data IMB
- f. Pembuatan profil investasi barang dan karet
- g. Identifikasi industri perbengkelan otomotif
- h. Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan barang dari latek
- i. Pengembangan otomotif dan alat angkut
- j. Mapping Industri Provinsi Jambi

Indikator Kinerja Program :

- a. Jumlah nilai investasi yang tertanam di Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)
- b. Jumlah nilai produksi Industri Kecil, Menengah dan Besar (Rp. Triliun)

5. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet
- b. Penguatan Kelembagaan Usaha Dagang Kecil Informal
- c. Promosi Penggunaan Produksi Dalam Negeri di Daerah
- d. Inventarisasi dan Pendataan Sarana Perdagangan

Indikator Kinerja Program yaitu :

- a. Jumlah perkembangan unit usaha perdagangan (unit)

- b. Jumlah transaksi lelang spot komoditi karet
- c. Jumlah nilai transaksi lelang forward komoditi agro

6. Program Pengembangan Standarisasi Nasional

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

- a. Pengembangan Infrastruktur Kelembagaan Standarisasi
- b. Pengawasan dan Pengendalian Mutu Barang SNI Wajib di Pasaran
- c. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Mutu Barang Ekspor dan Impor
- d. Sosialisasi laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi
- e. Penambahan peralatan dan bahan uji serta perawatan laboratorium
- f. Peningkatan SDM Petugas Kalibrasi BPSMB

Indikator Kinerja Program yaitu :

- a. Jumlah contoh komoditi yang diuji
- b. Jumlah penerimaan jasa pengujian BPSMD/PAD

7. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kegiatan yang dilakukan yaitu :

- a. Pengembangn dan pelayanan teknologi industri
- b. Fasilitasi Pengembangan Industri Hilir

Indikator Kinerja Program yaitu :

Jumlah perkembangan industri Menengah dan Besar

Selain indikator kinerja program tersebut diatas, terdapat beberapa indikator makro bidang perindustrian dan perdagangan antara lain :

Bidang Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
2. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri
3. Pertumbuhan Sektor Industri
4. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin

Memperhatikan semua indikator makro bidang perindustrian tersebut diatas, diperkirakan pada tahun 2015 mengalami kenaikan yaitu antara 13,0 – 13,5% untuk kontribusi sektor industri terhadap PDRB, 3,71- 4,00 % untuk kontribusi industri rumah tangga terhadap PDRB sektor industri, 7,1-7,5 % untuk pertumbuhan sektor industri dan 16 kelompok untuk cakupan bina kelompok pengrajin.

Bidang Perdagangan

- 1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
- 2. Ekspor Bersih Perdagangan
- 3. Pertumbuhan Sektor Perdagangan

Indikator makro bidang perdagangan sebagaimana tersebut diatas, diperkirakan juga mengalami kenaikan pada tahun 2015 yaitu antara 14,6-14,8 untuk Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, 18,102 M untuk Ekspor bersih perdagangan dan 8,4 – 8,8 % untuk pertumbuhan sector perdagangan. Perkembangan indikator makro bidang perindustrian dan perdagangan mulai dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada tabel 6.1.

Tabel 6.1. Perkembangan Indikator Makro Bidang Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2010-2015

No.	Indikator Kinerja Daerah	Capaian Setiap Tahun					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
A.	Bidang Perindustrian						
	1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	11,9	11,1-11,2	11,2-11,4	11,5-12,0	12,1-12,9	13,0-13,5
	2. Kontribusi Industri Rumah Tangga Terhadap PDRB Sektor Industri (%)	3,50	3,51-3,53	3,54-3,56	3,57-3,62	3,63-3,70	3,71-4,00
	3. Pertumbuhan Sektor Industri (%)	4,90	4.9-5,0	5,5-5,9	5,9-6,3	6,3-6,7	7,1-7,5
	4. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (kelompok)	13	13	15	20	23	25
B.	Bidang Perdagangan						
	1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	14,5	14,1-14,3	14,3-14,4	14,4-14,5	14,5-14,6	14,6-14,8
	2. Ekspor Bersih Perdagangan (Rp. Milyar)	7.000	8.100	9.652,5	11.437,9	13.491,1	15.852,3
	3. Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	7,69	7,0-7,2	7,3-7,6	7,6-8,0	8,0-8,4	8,4-8,8

Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi pada Tahun 2010-2015 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana ditampilkan pada tabel 6.2. dibawah ini.











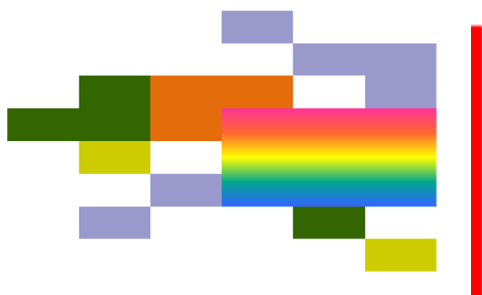












BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan pedoman dan arahan bagi masing-masing SKPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Provinsi Jambi sesuai dengan posisi dan peran yang diemban, dan dengan berpedoman kepada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2010-2015. Renstra SKPD ini akan menjadi dasar dalam penyusunan Renja dan RKPD serta digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 tentunya akan dapat diwujudkan dengan dukungan dari seluruh stakeholder yang ada, kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, komitmen serta dukungan DPRD Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta kerjasama dengan perguruan tinggi, pihak swasta, LSM dan masyarakat.

GUBERNUR JAMBI,

H. HASAN BASRI AGUS



Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, guna sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dalam rangka untuk mengoptimalkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama periode 2010-2015 dan sangat berperan bagi organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, terutama untuk :

1. Pedoman/panduan dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja.
2. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
3. Mengelola keberhasilan dan kemanfaatan.
4. Orientasi di masa depan.
5. Mengoptimalkan pelayanan prima kepada customer dan stakeholders yang diimbangi dengan akuntabilitas.
6. Meningkatkan komunikasi dan informasi, serta transparansi.

Selanjutnya, Renstra ini akan segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 dan keberhasilan pencapaiannya sangat ditentukan oleh kinerja seluruh unit kerja di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra dimaksud secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian.

Jambi, Pebruari 2012
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi

Drs. H. ABD. ZAKI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19591112 199003 1 005

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR : /KEP.GUB/BAPPEDA-2/2012
TANGGAL : 2012



Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2010-2015, guna sebagai acuan bagi kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun dalam rangka untuk mengoptimalkan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi selama periode 2010-2015 dan sangat berperan bagi organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, terutama untuk :

7. Pedoman/panduan dalam penyusunan dan penetapan rencana kerja.
8. Merencanakan dan melakukan perubahan strategis.
9. Mengelola keberhasilan dan kemanfaatan.
10. Orientasi di masa depan.
11. Mengoptimalkan pelayanan prima kepada customer dan stakeholders yang diimbangi dengan akuntabilitas.
12. Meningkatkan komunikasi dan informasi, serta transparansi.

Selanjutnya, Renstra ini akan segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2010-2014 dan keberhasilan pencapaiannya sangat ditentukan oleh kinerja seluruh unit kerja di lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan Renstra dimaksud secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi serta pengawasan dan pengendalian.

Jambi, Pebruari 2012
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jambi



Drs. H. ABD. ZAKI, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19591112 199003 1 005



Tabel 4.4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindag Provinsi Jambi

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Sasaran					
				Tahun 2010	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan usaha industri di Provinsi Jambi	Tumbuh dan berkembangnya usaha industri kecil, menengah dan besar.	Jumlah unit usaha industri kecil, menengah dan besar (unit)	Pembinaan unit usaha, tenaga kerja, nilai produksi dan nilai investasi	24,500	25,250	26,160	26,468	26,997	27,537
		Jumlah tenaga kerja industri kecil, menengah dan besar (orang)		80.155	83.708	87,949	92,846	97,488	102,362
		Jumlah nilai investasi yang tertanam di industri kecil, menengah dan besar (Rp. Triliun)		13,43	14,19	14,50	14,86	15,25	15,71
		Jumlah nilai produksi Industri kecil, menengah dan besar (Rp. Triliun)		3,020	3,020	3,,480	3,654	3,841	4,033
			Terlaksananya Pengembangan dan peningkatan SDM Industri Kecil dan Menengah (IKM) berupa :						
			Pelatihan teknis industri kecil	1 kali (111 org)	-	-	-	-	-
			Magang Industri Kecil dan Menengah Keluar Daerah	1 kali (18 org)	-	-	-	-	-
			Pelatihan Pengolahan Aneka Makanan se Provinsi Jambi	-	-	2 kali /50 org	2 kali /50 org	2 kali /50 org	2 kali /50 org
			Terlaksananya pelatihan kewirausahaan CEFE	24 orang	20 orang	-	25 orang	-	25 orang
			Terlaksananya pelatihan anyaman bambu	18 orang	24 orang	-	-	25 orang	-
			Terlaksananya sosialisasi standarisasi dan mutu Bata genteng	-	11 Kec. (220 Perajin)	-	-	11 Kec. (220 Perajin)	11 Kec. (220 Perajin)
			Terselenggarannya pameran dan promosi IK regional dan lokal Provinsi Jambi	5 Pkt/ Keg	10 Paket/keg	10 Pkt/ Keg	10 Pkt/ Keg	10 Pkt/ Keg	10 Pkt/ Keg
			Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Mutu Produk Bordir KUB Bordir Kasang	-	25 orang	-	-	25 orang	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

			Terlaksananya Sosialisasi Penggunaan Barang tambahan makanan dan untuk IK pangan	-	30 orang	-	-	-	30 orang
			Terlaksananya Pelatihan motivator KUB industri kecil	-	24 orang	-	-	25 orang	-
			Terlaksananya Pelatihan desain pakaian dan produk konveksi bagi IK sandang/batik dan pembuatan canting cap batik	-	22 orang	-	25 orang	-	25 orang
			Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Usaha Industri Kecil berupa :						
			1. Bimbingan Usaha Kelompok Industri Kecil	-	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.
			2. Fasilitasi dan Akses Permodalan Usaha Industri Kecil	-	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.	11 Kec.
			3. Bantuan Peralatan, bahan dan kemasan	-	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket
			4. Fasilitasi Sarana dan Prasarana	-	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket
			Terlaksananya sosialisasi sertifikasi produk halal bagi IK makanan	-	1 kali (25 orang)	-	-	1 kali (25 orang)	-
			Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Angka Makanan di Desa Mandiri Pangan	-	1 kali (40 orang)	1 kali (40 orang)	1 kali (40 orang)	1 kali (40 orang)	1 kali (40 orang)
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Dukungan Pengembangan Rumah Tenun di Jambi	5 orang	20 orang	8 orang	10 orang	10 orang	10 orang
			Terlaksananya Bimbingan Teknis Peningkatan Mutu Produk Industri Bata Genteng dan Pencegahan Pencemaran Lingkungan	-	1 kali (50 orang)	-	-	-	1 kali (50 orang)
			Terlaksananya Penayangan Film Produk IKM unggulan	-	24 kali	-	-	20 kali	-
			Terlaksananya kegiatan Calon Fasilitator GKM Industri Kecil bagi aparat pembina Kab/Kota se Provinsi Jambi berupa :	-	7 hari (22 peserta)	-	-	7 hari (25 peserta)	7 hari (25 peserta)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

			1. Pelatihan GMP dan Bimbingan cara-cara berproduksi yang lebih baik dan pengujian mutu produk. 2. Pelatihan Motivasi Usaha (AMT) dan Peltatihan Kewirausahaan 3. Tertayangnya Tayangan Produk IKM Melalui Televisi Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring Perkembangan IKM dan KUB berupa : 1. Evaluasi dan Monitoring kegiatan program 2. Evaluasi dan Monitoring Produk Unggulan Daerah Terlaksananya Bimtek Produksi Makanan Olahan Unggulan Daerah Terlaksananya Bimtek Dalam rangka pengembangan produk unggulan di Kota Mandiri Terpadu Terlaksananya Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan spare part kendaraan roda 2 dari karet berupa : 1. Pelatihan pembuatan spare part kendaraan roda 2 dari karet 2. Pemberian bantuan mesin peralatan pembuatan spare part kendaraan roda 2 dari karet Terpantaunya proses teknik industri Terlaksananya seminar batik jambi Terlaksananya fasilitasi Pengembangan Pengrajin IKM se Provinsi Jambi Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Cendramata	1 Pkt/Keg (20 org) 1 Pkt/Keg (24 org) - 1 Pkt/Keg (11 Kab/ Kota) 1 Pkt/Keg (2 Komdt/ 3 lok) 1 kali/30 org 2 kali/50 org - - - - -	2 Pkt/Keg (60 org) 1 Pkt/Keg (24 org) 1 Pkt/ Keg 1 Pkt/Keg (11 Kab/ Kota) 1 Pkt/ Keg (2 Komdt) 1 kali/30 org 2 kali/50 org - - - - -	-	-	2 Pkt/Keg (60 org) 1 Pkt/Keg (24 org) 2 Pkt/ Keg 1 Pkt/Keg (11 Kab/ Kota) 1 Pkt/ Keg (2 Komdt) 1 kali/30 org 2 kali/50 org - - 1 paket 25 perusahaan 180 orang 1 paket - 1 kali (25 orang)	-	2 Pkt/Keg (60 org) 1 Pkt/Keg (24 org) 2 Pkt/ Keg 1 Pkt/Keg (11 Kab/ Kota) 1 Pkt/ Keg (2 Komdt) 1 kali/30 org 2 kali/50 org - - 1 paket 25 perusahaan - 1 paket 1 kali (25 orang)	2 Pkt/Keg (60 org) 1 Pkt/Keg (24 org) 2 Pkt/ Keg - - 1 kali/30 org 2 kali/50 org 25 orang 1 paket 30 perusahaan - 1 paket 1 kali (25 orang)
--	--	--	--	--	---	---	---	--	---	---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Terlaksananya pameran kemah pramuka putri Nasional Se Indonesia di Provinsi Jambi	-	-	1 kali	-	-	-

			Terlaksananya pelatihan pengembangan desaian batik tulis, pewarna batik dan pembuatan canting batik	-	-	-	1 kali /25 orang	1 kali /25 orang	1 kali /25 orang
			Terlaksananya Pelatihan Kerajinan Kayu	-	-	-	-	1 kali/30 org	1 kali/30 org
			Pemetaan Industri Menengah dan Besar						
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Pelaksanaan Perizinan Usaha Industri	-	1 kali (30 orang)	-	-	-	1 kali (30 orang)
			Terlaksananya Identifikasi Bahan Baku pada Industri Hilir Karet	-	1 kali	-	-		1 kali
			Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Penerapan SNI Industri AMDK	-	1 kali (30 orang)	-	-	-	1 kali (30 orang)
			Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Pengembangan Industri Hilir Karet (Lateks)	-	1 kali (35 orang)	-	-	-	1 kali (35 orang)
			Terlaksananya Updating data IMB	-	-	1 kali (10 buku)	-	-	-
			Terlaksananya Pembuatan Profil Investasi Barang dan karet	-	-	1 kali (10 buku)	-	-	-
			Terlaksananya Identifikasi Perbengkelan Otomotif	-	-	1 kali (10 buku)	-	-	-
			Terlaksananya Pelatihan dan bantuan mesin peralatan pembuatan barang dari latek	-	-	1 kali (15 orang)	1 kali (15 orang)	1 kali (15 orang)	1 kali (15 orang)
			Terlaksananya magang pembuatan sparetpart kendaraan roda 2)	-	-	1 kali (5 orang)	1 kali (5 orang)	1 kali (5 orang)	1 kali (5 orang)
			Terlaksananya Mapping Industri Provinsi Jambi	-	-	1 kali	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya teknologi industri tepat guna						
			Terlaksananya Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri	-	-	-	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota	11 Kab/Kota

Peningkatan usaha perdagangan dalam negeri di Provinsi Jambi	Tumbuh dan berkembangnya usaha perdagangan dalam negeri.	Jumlah unit usaha perdagangan (unit)	Terlaksananya pelatihan pengembangan Industri Hilir				1 hari/ 4 orang	1 hari / 5 orang	1 hari/ 6 orang
			Terlaksananya pemberian bantuan peralatan mesin industri untuk masyarakat	-	-	-	1 paket	1 paket	1 paket
				-	-	-		1 kali (20.org)	1 kali (20.org)
			Terselenggaranya pembinaan pasar lelang spot dan forward	25,550	30,550	35,098	38,607	42,467	46,713
			Jumlah aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang agro (Rp. Juta)	13,500	14,000	14,450	14,995	15,494	16,043
			Jumlah aktivitas perdagangan melalui kegiatan pasar lelang karet (Rp. Juta)	78,895	89,678	99,803	109,783	120,761	132,837
			Terlaksananya fasilitasi usaha dagang kecil/informal (bantuan modal/sarana usaha)	1 Pkt/ 2. Keg 20 org/20 unit)	1 Pkt/ 2. Keg 20 org/20 unit)	1 Pkt/ 2. Keg 20 org/20 unit)	1 Pkt/ 2. Keg 20 org/20 unit)	1 Pkt/ 2. Keg 20 org/20 unit)	1 Pkt/ 2. Keg 20 org/20 unit)
			Terlaksananya Pameran Dalam Provinsi Jambi (pameran JBD, MTQ, Produk Kreatif)	3 Pkt / Keg.	3 Pkt / Keg.	3 Pkt / Keg.	3 Pkt / Keg.	3 Pkt / Keg.	3 Pkt / Keg.
			Terlaksananya dukungan dan Pengembangan Pasar Lelang Karet berupa :						
			Pembinaan Pasar Lelang Karet	2 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Peningkatan akses ekspor non migas dan peningkatan kapasitas pelayanan kepada pelaku usaha perdagangan luar negeri	Meningkatnya ekspor non migas dalam perkuatan neraca perdagangan daerah	Jumlah nilai ekspor non migas (US \$ Juta)	Meningkatnya volume nilai ekspor dan neraca perdagangan daerah	1,000	1,200	1,400	1,600	1,800	2,000
		Jumlah neraca perdagangan daerah (Rp. Milyard)		700	810	965	1.144	1.349	1.585
			Terlaksananya Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor Terlaksananya Pelatihan Akses dan Survey Pasar melalui Internet	2 Pkt/ Keg (100 org) 30 orang	2 Pkt/ Keg (60 org) 30 orang	2 Pkt/ Keg (60 org) -	3 Pkt/ Keg (90 org) -	3 Pkt/ Keg (90 org) -	3 Pkt/ Keg (90 org) -

			2.. Pengawasan Distribusi barang yang diatur tataniaganya (Pupuk, Minuman beralkohol, bahan berbahaya)	1 Pkt/ Keg (6.Kab)	1 Pkt/ Keg (6.Kab)	1 Pkt/ Keg (6.Kab)	1 Pkt/ Keg (6.Kab)	1 Pkt/ Keg (6.Kab)	1 Pkt/ Keg (6.Kab)
			3 Pengawasan Garam Beryodium	1 Pkt/ Keg (11Kab/ Kota), 2 kl	1 Pkt/ Keg (11Kab/ Kota), 2 kl	-	-	-	-
			Terlaksananya Pengembangan Insfrastruktur Lembaga laboratorium UPTD Metrologi berupa :						
			1 Kompetensi sistem managemen mutu dan lab. Kemetrolagian	1 Pkt/Keg (3 unit)	1 Pkt/Keg (3 unit)	1 Pkt/Keg (3 unit)	1 Pkt/Keg (4 unit)	1 Pkt/Keg (5 unit)	1 Pkt/Keg (6 unit)
			Terselenggaranya pasar murah bahan pokok	15.000 paket	20.000 paket	20.000 paket	20.000 paket	20.000 paket	20.000 paket
			Terlaksananya kegiatan kalibrasi dan verifikasi peralatan standar lab.	1 Pkt/keg (10.Unit)	1 Pkt/Keg (10 unit)	1 Pkt/keg (15.Unit)	1 Pkt/keg (15.Unit)	1 Pkt/keg (20.Unit)	1 Pkt/keg (20.Unit)
			Terlaksananya Tera/tera ulang alat UTTP lab. Kemetrolagian	1 Pkt/keg (15.000 unit)	1 Pkt/ Keg (17.500 unit)	1 Pkt/ Keg (20.000 unit)	1 Pkt/ Keg (22.500 unit)	1 Pkt/ Keg (25.000 unit)	1 Pkt/ Keg (27.500 unit)
			Terlaksananya Pengawasan UTTP dan BDKT	5.000 unit	5.750 unit	6.250 unit	7.000 unit	7.750 unit	8.500 unit
			Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kemetrolagian dan Perlindungan Konsumen	-	-	-	-	-	3 kali
			Terlaksananya Pengembangan Insfrastruktur Kelembagaan Standarisasi berupa:						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1. Pembelian bahan kimia untuk Lab. UPTD BPSMB	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg
			Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian mutu SNI Wajib di Pasaran berupa :						
			1. Pengawasan SNI Wajib di pasaran	1 Pkt/ Keg (3.Komdt/ 7 Kab/ Kota)	1 Pkt/ Keg (5.Komdt/ 7 Kab/ Kota)	1 Pkt/ Keg (5.Komdt/ 7 Kab/ Kota)	1 Pkt/ Keg (5.Komdt/ 7 Kab/ Kota)	1 Pkt/ Keg (5.Komdt/ 7 Kab/ Kota)	1 Pkt/ Keg (5.Komdt/ 7 Kab/ Kota)
			Terlaksanaya Peningkatan Kapasitas Lab. Penguji mutu barang ekspor dan impor berupa :						

			1. Penambahan ruang lingkup pengujian dan pemeliharaan akreditasi UPTD BPSMB Terlaksananya Sosialisasi Laboratorium kalibrasi yang sudah terakreditasi berupa :	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg	1 Pkt/ Keg
			1. Sosialiasi SNI Mutu BOKAR	2 Pkt/ Keg (70.org)	2 Pkt/ Keg (2 Kab,30 org)	2 Pkt/ Keg (2 Kab,30 org)	2 Pkt/ Keg (2 Kab,30 org)	2 Pkt/ Keg (2 Kab,30 org)	2 Pkt/ Keg (2 Kab,30 org)
			2. Sosialiasi Lab. Kalibrasi yang sudah terakreditasi Terlaksananya Penambahan pembelian peralatan dan bahan uji serta perawatan berupa :	-	2 Pkt/ Keg (2 Kab/ Kota)	2 Pkt/ Keg (2 Kab/ Kota)	2 Pkt/ Keg (2 Kab/ Kota)	2 Pkt/ Keg (2 Kab/ Kota)	2 Pkt/ Keg (2 Kab/ Kota)
			1. Pembelian Peralatan BPSMB	-	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket
			Terlaksananya Peningkatan SDM petugas kalibrasi BPSMB berupa :						
			1. Pelatihan, Magang dan study banding	-	4 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg	4 Pkt/ Keg